

INDONESIA

# Likuifaksi, Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah: Kebutuhan Penduduk

Penilaian Kebutuhan Multi-Sektor:  
Laporan Ringkasan Eksekutif

Februari 2019



Funded by  
European Union  
Humanitarian Aid



KlasNas PP  
KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA



unicef  
for every child



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
\* PALU \*  
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF PALU



**REACH** Informing  
more effective  
humanitarian action

Masjid di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang rusak karena gempa. Foto Kredit – Ari Weiss, Oktober 2018.

### Tentang REACH

REACH merupakan inisiatif bersama dari dua lembaga internasional (non pemerintah) yakni ACTED, IMPACT Inisiatif dan Lembaga PBB UN Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT). Misi REACH adalah untuk memperkuat aktor-aktor humanitarian dalam mengambil keputusan berbasis bukti/fakta melalui pengumpulan, manajemen, dan analisis data yang efisien baik sebelum, pada saat dan setelah keadaan darurat.

Dengan melakukan hal ini, maka REACH berkontribusi dalam memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak dari keadaan darurat dapat menerima dukungan/bantuan yang mereka butuhkan. Semua kegiatan REACH dilakukan untuk mendukung dan dalam kerangka mekanisme koordinasi antar-lembaga pemberi bantuan. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi situs web kami: [www.reach-initiative.org](http://www.reach-initiative.org).

Anda dapat menghubungi kami langsung di: [geneva@reach-initiative.org](mailto:geneva@reach-initiative.org) dan ikuti kami di Twitter @REACH\_info.

## RINGKASAN

Kejadian gempa bumi dengan magnitudo 7,7 SR pada 28 September 2018, menyebabkan sebahagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Mautong mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.<sup>1</sup> Data yang dirilis pada 20 Desember 2018, dari total 1,2 juta jiwa penduduk sebelum kejadian bencana, korban jiwa mencapai 2.227, 164.626 jiwa harus mengungsi ke pengungsian informal dan ke tenda-tenda di luar rumah mereka, dan 20,257 jiwa sangat membutuhkan tempat penampungan sementara.<sup>2,3</sup>

Namun, setelah empat bulan paska gempa bumi, informasi mengenai kebutuhan dan kondisi masyarakat yang terkena dampak/pengungsi di Provinsi Sulawesi Tengah masih sangat minim. Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi ini, maka REACH, sebagai salah satu mitra siaga dari *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) turut serta dalam mendukung Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Universitas Muhammadiyah, Palu (UNISMUH) untuk melakukan Penilaian Kebutuhan Multi-Sektor (MSNA) hingga ke tingkat rumah tangga, atas nama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dukungan finansial dari ECHO.

Penilaian ini merupakan survey tingkat rumah tangga yang representatif secara statistik, dilaksanakan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdampak gempa, meliputi 38 dari total 62 Kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala, Sigi, dan Kota Palu. Indikator dan kuisisioner dibangun dan disepakati secara bersama dengan melibatkan mitra-mitra kemanusiaan dari Klaster PP. Kuisisioner ini kemudian dikeloa oleh enumerator terlatih untuk melakukan sampling acak pada skala rumah tangga di masing-masing Kecamatan target. Hasilnya merupakan representasi statistik dengan minimum tingkat kepercayaan 95% dan margin kesalahan 10% di tingkat Kecamatan dan untuk enam kelompok populasi yang terpisah pada tingkat krisis berdasarkan status pengungsian mereka. Pengumpulan data berlangsung antara tanggal 22 Januari hingga 06 Februari 2019 dengan tim yang terdiri atas 71 orang pencacah/enumerator dan 9 orang pimpinan tim serta seimbang secara gender, menggunakan kuisisioner dan aplikasi Kobo. Rumah tangga sasaran diidentifikasi menggunakan titik-titik GPS yang telah di acak berdasarkan *footprints* lokasi-lokasi pengungsian yang diperoleh dari OpenStreetMap. Secara total, terdapat 4.264 rumah tangga yang diwawancarai. Namun, penilaian ini tidak mencakup daerah yang sangat terpencil atau tidak dapat diakses, dan tidak mencakup rumah tangga yang telah tinggal di tempat penampungan sementara pemerintah (huntara kolektif) ketika rumah tangga tersebut berpindah ke tempat penampungan tersebut setelah tim penilai menyelesaikan surveynya pada lokasi-lokasi tersebut.

Berikut ini merupakan temuan-temuan utama dari penilaian ini:

- 26% rumah tangga telah mengungsi diluar rumah atau tempat tinggal mereka sendiri; namun, hanya terdapat 9% dari rumah tangga yang tinggal di penampungan/pengungsian informal yang telah di data dari penilaian dan intervensi sebelumnya. Kebanyakan para pengungsi tersebut, (10%) tinggal pada rumah-rumah kosong yang telah disiapkan oleh komunitas yang tidak mengungsi, dan 5% lainnya tinggal pada tenda-tenda diluar rumah mereka sendiri.
- Kebutuhan cenderung lebih bervariasi berdasarkan status pengungsian daripada pengaruh faktor geografis. Sebagian besar rumah tangga di Palu, Sigi, dan Donggala memiliki kebutuhan yang sama, dalam hal ketahanan pangan, air, sanitasi dan kebersihan (WASH). Sementara di Parigi Moutong, yang dampak bencananya tidak terlalu besar, kebutuhannya berbeda, dimana kebutuhan mereka umumnya lebih terkait pada kesehatan dan pendidikan.

<sup>1</sup> Likuifaksi terjadi ketika kekuatan dan kekakuan tanah jenuh (*water-saturated soil*) berkurang akibat guncangan gempa ataupun sumber getaran lainnya, menyebabkan tanah kehilangan integritasnya dan kemampuannya dalam mendukung bangunan/struktur lain yang ada di atasnya. Universitas Washington, Fakultas Teknik Sipil, "Apa itu likuifaksi?" 27 Januari 2000.

<sup>2</sup> UNOCHA, Humanitarian Snapshot of Central Sulawesi, 20 Desember 2018.

<sup>3</sup> Menurut BNPB per tanggal 10 Desember 2018, terdapat 2.101 korban jiwa, 1.373 korban hilang, 133.631 jiwa mengungsi, dan 20.000 anak-anak memiliki masalah perlindungan anak (Humanitarian Country Team, Central Sulawesi Earthquake & Tsunami: Situation Report #10, 10 Desember 2018).



- Akses pendidikan sebagian besar telah kembali ke tingkat yang sama seperti sebelum bencana; Namun Banyak anak-anak di Parigi Moutong dilaporkan tidak bersekolah bahkan sebelum kejadian bencana, Hal ini menunjukkan adanya masalah mendasar di luar perbaikan sekolah.
- Masalah kesehatan kemungkinan lebih diperburuk oleh masalah yang belum terselesaikan seputar gizi dan sanitasi; gizi buruk dan kebersihan lingkungan yang dikuti oleh tingginya kasus diare pada rumah tangga di lokasi pengungsian dapat menyebabkan kebutuhan tambahan untuk layanan kesehatan.
- Rumah tangga yang mengungsi, terutama yang tinggal pada lokasi pengungsian informal dan yang tinggal pada tenda ataupun tenda-tenda darurat di samping bekas rumah mereka sendiri, merupakan kelompok rumah tangga yang paling rentan dalam paling terpengaruh oleh dampak bencana. Mereka telah menderita lebih banyak kerugian ekonomi, dan akan membutuhkan lebih banyak dukungan untuk membangun kembali bisnis dan mata pencaharian mereka dalam kondisi pengungsian.
- Meskipun sejumlah besar rumah tangga pengungsi tinggal di rumah-rumah yang didukung langsung oleh komunitas/tuan rumah local yang tidak mengungsi, namun mereka juga mengalami kesulitan dalam mengakses beberapa layanan, khususnya dukungan tempat tinggal, dan seringkali kesulitan untuk mengakses bantuan itu timbul karena mereka sulit dibedakan dengan populasi lokal yang tidak mengungsi.
- Akses ke layanan di Palu sangat bergantung pada status para pengungsi; rumah tangga yang tidak mengungsi cenderung mengakses layanan dasar dengan lebih mudah dan memadai daripada papera ngungsi. Di Donggala dan Sigi, akses layanan lebih tergantung pada seberapa jauh kecamatan itu dari Kota Palu. Sebagian besar rumah tangga di Parigi Moutong tidak terpengaruh oleh bencana dan keluhan rumah tangga lebih terfokus pada masalah jangka panjang, seperti kurangnya akses ke layanan kesehatan atau air yang tidak mencukupi.
- Meskipun permasalahan sanitasi yang ditemukan pada saat survey awal sebahagian besar I telah mendapatkan respon, namun laporan rumah tangga pengungsi menunjukkan bahwa tingkat buang air besar sembarangan berada pada level yang mengkhawatirkan, dan meskipun terdapat cukup jamban komunal/umum pada lokasi-lokasi pengungsian informal, namun ternyata banyak diantaranya tidak dilindungi dengan item-item perlindungan dasar.
- Mayoritas rumah tangga lebih memilih untuk membangun kembali atau memperbaiki sendiri bekas rumah mereka; namun, tanpa adanya dukungan/bantuan mereka tidak akan mampu melakukannya. Selain itu, mayoritas rumah tangga tersebut menyatakan keinginannya untuk tetap tinggal di lokasi mereka saat ini dalam waktu 6 bulan kedepan, meskipun saat ini, banyak diantara mereka hidup dalam pengungsian. Selain itu, kebanyakan rumah tangga pengungsi yang tinggal di pengungsian informal ataupun pengungsian sementara di samping rumahnya tidak memiliki tempat pada lokasi pengungsian milik pemerintah tetapi ingin untuk membangun kembali rumah mereka. Namun sayangnya, kebanyakan rumah tangga tersebut terkendala dalam membangun kembali rumahnya tanpa adanya bantuan / dukungan.
- Makanan adalah salah satu jenis bantuan yang paling dibutuhkan oleh seluruh rumah tangga, baik itu berdasarkan kabupatennya ataupun status pengungsian. Meskipun sebagian besar indikator untuk ketahanan pangan berada pada level dapat diterima (*acceptable*) dan jenis bantuan yang paling umum diterima adalah makanan, kurangnya keragaman pada bantuan makanan sangat berpotensi dalam meningkatnya kondisi kekurangan gizi pada anak-anak dan anggota rumah tangga lain yang mengkonsumsinya.

- Rumah tangga yang tinggal di daerah yang terlanda likuifaksi dan tsunami tidak dapat kembali dan membangun di tanah mereka. Banyak yang telah dipindahkan ke tempat penampungan sementara yang dibangun pemerintah; namun, masih banyak rumah tangga lain belum dapat kembali ke rumah/tempat asalnya dan mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk dapat pindah ke zona yang lebih aman. Selain itu, sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah yang tidak terpengaruh oleh likuifaksi pada kejadian gempa terakhir, sebenarnya juga merupakan daerah yang sangat rentan terhadap likuifaksi, dan masyarakat yang tinggal pada daerah/wilayah tersebut sangat rentan dan berisiko terhadap bencana masa depan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> The Conversation, "2012 peneliti telah mengidentifikasi Kota Palu, Indonesia sebagai daerah yang berisiko tinggi terhadap kejadian likuifaksi," 2018.

**DAFTAR ISI**

Likuifaksi, Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah : Kebutuhan Penduduk..... 0

Indonesia ..... 0

Penilaian Kebutuhan Multi-Sektor ..... 0

Februari 2019..... 0

**RINGKASAN ..... 2**

    Daftar Singkatan ..... 5

    Klasifikasi Geografis ..... 5

    Daftar Gambar, Tabel dan Peta ..... 5

**PENDAHULUAN..... 7**

**METODOLOGI ..... 8**

**TEMUAN ..... 12**

    Populasi dan Metadata Responden ..... 12

        Populasi..... 12

    Pengungsian dan Perlindungan ..... 13

        Rumah tangga pengungsi ..... 14

        Rumah tangga yang tidak mengungsi ..... 14

        Motive Perpindahan ..... 15

    Pengungsian ..... 16

        Tipe Shelter ..... 16

        Penggusuran ..... 16

        Sewa dan Kepemilikan ..... 17

        Bantuan Pengungsian dan Rekonstruksi ..... 18

    Perlindungan ..... 18

        Perlindungan hak-hak perempuan ..... 18

        Perlindungan Anak ..... 19

        Dukungan Psikososial ..... 19



Disabilitas, Manula, Minoritas.....	19
Air bersih, Sanitasi, dan Kebersihan .....	19
Air Bersih.....	19
Sanitasi.....	21
Kebersihan .....	22
Ekonomi .....	23
Ketahanan Pangan .....	24
Kesehatan.....	26
Pendidikan .....	28
Berkomunikasi dengan Komunitas.....	29
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>30</b>
Rekomendasi .....	31
<b>ANNEXES.....</b>	<b>33</b>
Annex 1: Household population and minimum sample size by Sub-district .....	33

## Daftar Singkatan

<b>DTM</b>	Displacement Tracking Matrix
<b>HFI</b>	Humanitarian Forum Indonesia
<b>IDP</b>	Internally Displaced Persons (Pengungsi)
<b>IFRC</b>	International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
<b>IOM</b>	International Organization for Migration
<b>KII</b>	Key Informant Interview
<b>KEMENSOS</b>	Kementrian Sosial Republik Indonesia
<b>ODK</b>	Open Data Kit
<b>UNICEF</b>	United Nations Emergency Children's Fund
<b>UNISMUH</b>	Universitas Muhammadiyah Palu
<b>WASH</b>	Water, Sanitation, And Hygiene

## Klasifikasi Geografis

<b>Provinsi</b>	Wilayah administratif di bawah Negara
<b>Kabupaten/Kota</b>	Wilayah administratif di bawah Provinsi; Kabupaten perkotaan disebut sebagai Kota
<b>Kecamatan</b>	Wilayah administratif di bawah Kabupaten/Kota; unit analisis terkecil dari penilaian ini
<b>Desa</b>	Wilayah administratif di bawah Kecamatan; wilayah administratif formal terkecil

## Daftar Gambar, Tabel dan Peta

Gambar 1: Struktur Koordinasi Bencana Palu, Indonesia	9
Tabel 1: Metadata Hasil Penilaian	11
Tabel 2: Informasi rumah tangga	12
Tabel 3: Laporan utama terkait masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir	27
Peta 1: Sebaran Kecamatan di Sulawesi Tengah yang di survey, 22 Januari s/d 6 Februari 2019	10
Peta 2: Praktik buang air sembarangan menurut Kecamatan	21
Peta 3: Rumah tangga yang melaporkan bahwa terdapat setidaknya satu orang anggota keluarga yang membutuhkan perawatan medis karena diare dalam 30 hari terakhir menurut Kecamatan	26
Gambar 1: Gambar 1: % rumah tangga berdasarkan pengungsian saat ini/ lokasi tinggalnya	13
Gambar 2: Jarak pengungsian rumah tangga dari rumah asalnya	14
Gambar 3: Keinginan untuk berpindah dalam 6 bulan ke depan paska pengambilan data, berdasarkan status pengungsiannya	15
Gambar 4: Tipe tempat tinggal, berdasarkan status pengungsiannya	16
Gambar 5: Perjanjian kepemilikan rumah menurut Kabupaten/Kota	17
Gambar 6: % Rumah tangga yang melaporkan kehilangan dokumen kepemilikan rumah menurut Status Pengungsiannya	17
Gambar 7: Bantuan yang paling diinginkan untuk meningkatkan situasi perumahan	18
Gambar 8: Rumah tangga dengan sedikitnya satu orang anggota keluarga yang mengalami tekanan emosional (mimpi buruk, kesulitan tidur, stres, gugup, dll.) setelah bencana	19
Gambar 9: Sumber utama air bersih berdasarkan Kabupaten/Kota dan status pengungsian	20
Gambar 10: Metode buang air besar menurut status pengungsiannya	22
Gambar 11: Metode buang air besar menurut Kabupaten/Kota	22
Gambar 12: % of Rumah tangga yang tidak memiliki akses ke fasilitas cuci tangan menurut status pengungsiannya	23
Gambar 13: Rumah tangga yang melaporkan bahwa seluruh anggota keluarganya tidak bekerja berdasarkan status pengungsiannya	24
Gambar 14: Rumah tangga yang memiliki anggota yang mampu dan mau untuk bekerja menurut alasan belum bekerja	24
Gambar 15: Skor Konsumsi Makanan menurut Kabupaten/Kota	25



Gambar 16: Rumah tangga dengan setidaknya satu orang anak yang tidak masuk sekolah, dengan alasan utama mengapa anak tersebut tidak masuk sekolah menurut Kabupaten/Kota.....28  
Gambar 17: Rumah tangga yang melaporkan telah menerima bantuan dalam satu bulan terakhir menurut Kabupaten/Kota dan status pengungsiannya .....29  
Gambar 18: Kebutuhan Prioritas menurut Kabupaten/Kota .....30



## PENDAHULUAN

Kejadian gempa bumi dengan magnitudo 7,7 SR pada 28 September 2018, menyebabkan sebahagian besar wilayah Kota Palu, Ibu kota Provinsi.<sup>5</sup> Bangunan termasuk rumah, pertokoan, masjid, dan hotel, runtuh, tersapu ataupun mengalami kerusakan parah. Seluruh desa terendam, ketika tanah yang mereka banguni terletak di daerah likuifaksi. Berdasarkan data hasil penilaian terakhir yang dirilis pada 20 Desember 2018, dari total 1,2 juta jiwa penduduk sebelum kejadian bencana, korban jiwa mencapai 2.227, 164.626 jiwa harus mengungsi ke pengungsian informal dan ke tenda-tenda di luar rumah mereka, dan 20,257 jiwa sangat membutuhkan tempat penampungan sementara.<sup>6</sup> Selain itu, yang masih belum diketahui adalah jumlah orang yang masih tinggal di rumah mereka atau telah meninggalkan Sulawesi Tengah sepenuhnya, dan tinggal di kota-kota dan desa-desa di seluruh Sulawesi dan Kepulauan lainnya di Indonesia.

Empat bulan setelah gempa bumi, sangat sedikit informasi yang tersedia tentang kebutuhan dan situasi perpindahan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebuah sistem untuk mengumpulkan informasi 5W (siapa, apa, di mana, kapan, berapa banyak) organisasi pelaksana telah dilaksanakan, dan beberapa penilaian cepat telah dilakukan pada minggu-minggu pertama, termasuk Penilaian Kebutuhan Bersama (JNA), yang dilakukan di tingkat desa dalam dua minggu pertama tanggapan, dan Matriks Cepat Pelacakan Penempatan Organisasi (DTM) Organisasi Migrasi, yang dilakukan pada bulan Oktober dan Desember 2018, dan menghasilkan bukti tepat waktu untuk merencanakan tahap awal tanggapan.

Namun, setelah empat bulan paska kejadian gempa bumi, informasi mengenai kondisi kebutuhan masyarakat dan situasi terkini dari pengungsi yang ada di Sulawesi Tengah masih sangat minim. Sebuah sistem pengumpulan informasi 5W (siapa, apa, di mana, kapan, berapa banyak) telah diimplementasikan oleh beberapa organisasi, dan penilaian cepat telah dilaksanakan pada minggu awal kejadian, termasuk sebuah penilaian kebutuhan gabungan (JNA) yang dilakukan di tingkat desa dalam dua minggu pertama tanggap darurat, serta penilaian cepat dengan matrix *Displacement Tracking Matrix (DTM)* milik International Organization for Migration (IOM), yang dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2018, dan menghasilkan bukti yang tepat waktu untuk kebutuhan perencanaan tahap awal tanggap darurat.<sup>7</sup>

Namun, penilaian-penilaian cepat tersebut hanya difokuskan pada wilayah pemukiman dan pengungsian yang mirip perkemahan saja. Sampai saat ini, tidak ada data yang tersedia terkait populasi yang tinggal di luar pemukiman dan pengungsian yang mirip perkemahan. Sistem 5W, meskipun berhasil, hanya memberikan informasi meliputi lokasi-lokasi aktor-aktor kemanusiaan bekerja dan kegiatan yang dilakukan mereka lakukan, dan bukan merepresentasikan kebutuhan penduduk itu sendiri. Kesenjangan informasi yang ada lebih terkait pada tidak tersedianya informasi mengenai pengungsi yang tinggal bersebelahan dengan rumah asli mereka yang rusak / hancur, pengungsi yang ditampung oleh rumah tangga lain atau tinggal di rumah kosong, yang menyewa, dan masyarakat yang tidak mengungsi dan masih tinggal di rumah mereka sendiri.

Kesenjangan informasi ini, berisiko dalam mendorong para aktor kemanusiaan untuk hanya focus pada wilayah pemukiman saja, dan ada risiko lain yakni ketidak seimbangan/ ketidak adilan layanan bantuan dapat menarik orang-orang untuk mendatangi pemukiman-pemukiman dan pengungsian yang mirip perkemahan tersebut. Selain itu, penilaian cepat tersebut sangat umum, dan tidak memberikan informasi detail seperti kebutuhan dan kerentanan pada level rumah tangga dari masyarakat yang terdampak. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah survey multi-sektor tingkat rumah tangga yang lebih mendalam yang nantinya akan sangat membantu dalam penyusunan rencana respon bencana tingkat menengah dan pada masa transisi menuju fase pemulihan awal/dini.

<sup>5</sup> Likuifaksi terjadi ketika kekuatan dan kekakuan tanah jenuh (*water-saturated soil*) berkurang akibat guncangan gempa ataupun sumber getaran lainnya, menyebabkan tanah kehilangan integritasnya dan kemampuannya dalam mendukung bangunan/struktur lain yang ada di atasnya. Universitas Washington, Fakultas Teknik Sipil, "Apa itu likuifaksi?" 27 Januari 2000.

<sup>6</sup> UNOCHA, Humanitarian Snapshot of Central Sulawesi, 20 Desember 2018.

<sup>7</sup> Humanitarian Forum Indonesia, Joint Needs Assessment (JNA) Sulawesi Tengah Earthquake and Tsunami 28 September 2018, 9 October 2018.; IOM, Displacement Tracking Matrix: Sulawesi Tengah Putaran 1, 20 Oktober 2018; IOM, Displacement Tracking Matrix: Sulawesi Tengah Putaran 2, 4 Desember 2019.

Untuk mengisi kesenjangan ini, REACH, sebagai mitra siaga badan PBB – *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) turut serta mendukung Forum Kemanusiaan Indonesia (HFI) dan Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) untuk melakukan Penilaian Kebutuhan Multi-sektor (MSNA) hingga ke tingkat rumah tangga atas nama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi tentang kebutuhan populasi untuk membantu memandu respon ketika memasuki fase pemulihan awal. Penilaian tersebut mencakup 4.264 rumah tangga yang dipilih secara acak dari empat kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang diwawancarai antara tanggal 22 Januari sampai dengan 6 Februari 2019. Informasi tersebut mencakup kebutuhan rumah tangga di sebagian besar sektor yang ada dalam sistem kluster Indonesia, dan dirancang untuk membantu menyediakan sebanyak mungkin informasi yang relevan bagi semua kluster dan mitra-mitranya.

Bagian selanjutnya memberikan gambaran mengenai metodologi yang dipergunakan dalam laporan ini, termasuk bagaimana desain penilaian, cara pemilihan responden, dan bagaimana tools survey dikembangkan. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan hasil/capaian, yang disampaikan secara detail, terstruktur berdasarkan sistem kluster di Indonesia. Laporan ini diakhiri dengan pesan kunci/utama dan kesimpulan yang diperoleh dari data, serta rekomendasi yang lebih luas mengenai cara terbaik dalam menanggapi kesimpulan yang ada pada data laporan ini.

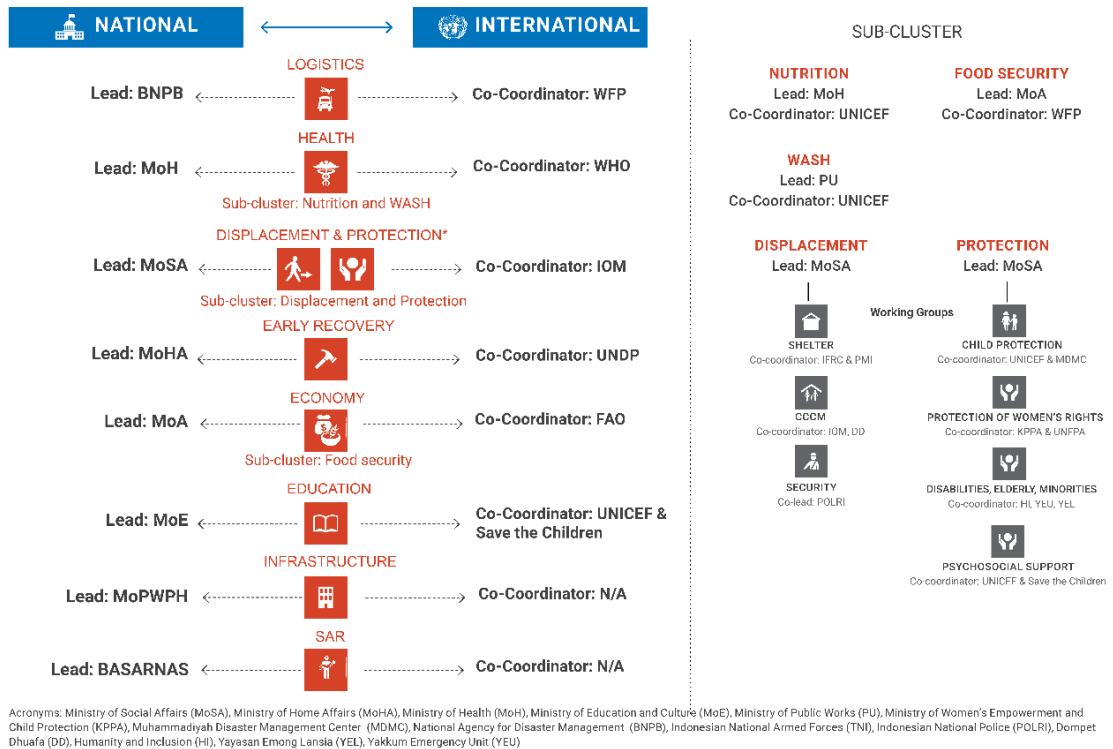
## METODOLOGI

Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan survey skala rumah tangga yang representatif secara statistik, yang dilakukan pada 38 Kecamatan dari total 62 Kecamatan terdampak gempa bumi, tsunami atau likuifaksi yang tersebar pada empat Kabupaten/Kota target yakni Donggala, Sigi, Parigi Mautong dan Palu. Adapun pemilihan kecamatan dilakukan berdasarkan tingkat keamanan akses bagi para pencacah/enumerator menuju kecamatan tersebut dari Kota Palu; Wilayah-wilayah yang sangat rawan longsor, tidak memiliki akses komunikasi, ataupun terlalu jauh untuk diakses oleh tim dari Kota Palu, tidak dimasukkan.

Satu set indikator bersama dan kuisisioner telah dibangun hasil kerjasama dengan beberapa lembaga kemanusiaan mitra Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan (KLASNAS PP), Klaster Kesehatan, Klaster Ekonomi dan Klaster Pendidikan. Selanjutnya, tools/kuisisioner ini di validasi oleh masing-masing focal point yang ada di dalam kelompok kerja (POKJA) manajemen informasi pada Januari 2019. Tools ini kemudian di konversi ke dalam aplikasi online Kobo yang di unduh dan di instal ke dalam masing-masing telepon genggam para enumerator/pencacah yang berjumlah 71 orang. Enumerator/pencacah ini merupakan mahasiswa UNISMUH, yang dibagi ke dalam 8 – 9 team, dimana setiap tim dipimpin oleh dosen ataupun staf dari fakultas Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah. Selain itu, sekitar setengah dari jumlah enumerator/pencacah yang terlibat adalah perempuan.

Gambar 2: Struktur Koordinasi Bencana Palu, Indonesia

**PALU COORDINATION STRUCTURE**



Rumah tangga yang menjadi skala/unit dasar pengukuran pada survey ini didefinisikan sebagai “kelompok orang yang hidup bersama dan makan dari sumber yang sama (sharing food).”

Rumah tangga yang disurvei dipilih secara acak melalui proses sebagai berikut : data dasar pengungsian dari 38 kecamatan yang di survey di unduh dari website open street map, dan dikombinasikan dengan data lokasi dan populasi pengungsian informal dari survey DTM yang dilakukan oleh IOM pada bulan Desember 2018.<sup>8</sup> Adapun jumlah sampling rumah tangga yang dibutuhkan untuk wawancara pada masing-masing kecamatan dihitung berdasarkan data penduduk tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang di ekstrapolasi oleh Kementerian Dalam Negeri, dimana data tersebut juga terdiri atas data rumah tangga dan individu hingga ke level desa (ADM4). Untuk desa yang datanya tidak ada(missing), maka dilakukan interpolasi menggunakan data BPS sensus penduduk tahun 2010. Kedua data tersebut diperoleh dari situs humanitarian data exchange (HDX).<sup>9</sup> Ukuran besar sampel (sample size) untuk masing-masing Kecamatan dapat dilihat Lampiran 1.

Pemilihan titik secara acak didasarkan pada jumlah total yang dibutuhkan untuk mencapai rentang kepercayaan 95% dan dengan 10% margin kesalahan pada setiap Kecamatan, serta dengan tambahan 10% “sampel buffer”/ cadangan sampel jika titik pengungsian yang disurvei ternyata kosong atau tidak dapat dicapai/diakses, ataupun jika ada data yang kemungkinan tereliminasi pada saat proses cleaning data dilakukan.<sup>10</sup> Titik-titik DTM yang diperoleh dari IOM yang menunjukkan lokasi kamp-kamp pengungsian juga disurvei berdasarkan ukuran populasi pada masing-masing lokasi dan proporsi populasi yang ada pada Kecamatan lokasi pengungsian tersebut.

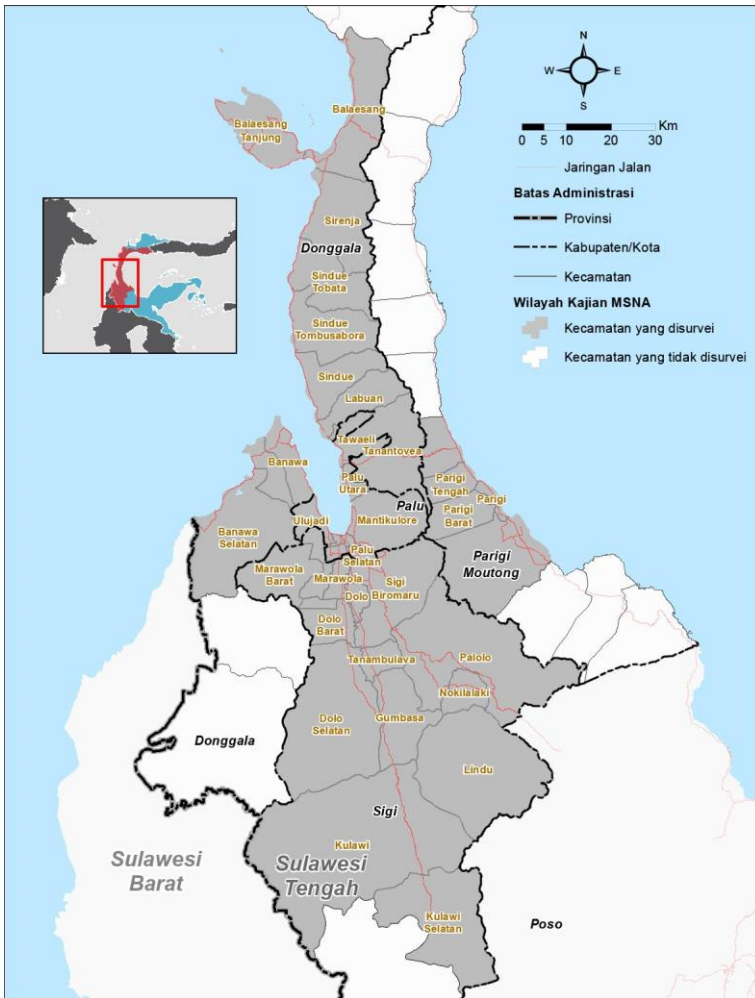
1. Individu pengungsi (IDPs) per lokasi pemukiman dan pengungsian yang mirip kamp.

<sup>8</sup> IOM, Displacement Tracking Matrix: Sulawesi Tengah Putaran 1, 20 Oktober 2018.

<sup>9</sup> <https://www.humanitarianresponse.info>

<sup>10</sup> Jumlah total rumah tangga yang dibutuhkan pada setiap Kecamatan dapat dilihat pada Annex 1.

Peta 1: Sebaran Kecamatan di Sulawesi Tengah yang di survey, 22 Januari s/d 6 Februari 2019



sama sebelum kejadian bencana.

Karena besarnya ukuran populasi, maka diperlukan sedikitnya 96 respondent untuk dapat merepresentasikan total populasi dengan rentang kepercayaan 95% dan dengan 10 % margin error pada setiap kelompok pengungsi. Tidak ada penyesuaian tambahan yang dilakukan dalam menentukan dasar sampling bagi rumah tangga pengungsi, dan diasumsikan bahwa selama pengambilan sampling, jumlah wawancara yang cukup akan dilakukan secara alami pada setiap kelompok populasi untuk dapat memenuhi nilai ambang batasnya. Namun, jika hal ini masih tidak dapat dipenuhi, maka tingkat kepercayaannya dan margin kesalahannya akan disesuaikan untuk mencerminkan hasilnya. Jumlah wawancara yang diperlukan pada setiap kecamatan tetapi tidak untuk keseluruhan kelompok populasi, dapat dipenuhi; batas rentang kepercayaan dan margin kesalahan telah disesuaikan. Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan ukuran sampel yang dihasilkan, rentang kepercayaan, dan margin kesalahan untuk setiap kelompok data berdasarkan Kecamatan, yang ditunjukkan pada Lampiran 1.

- a. Teridentifikasi oleh DTM sebagai lokasi pengungsian informal dengan minimum 16 orang yang tinggal secara terkonsentrasi.
2. Rumah tangga yang mengungsi disamping rumahnya masing-masing.
  - a. Diidentifikasi sebagai satu keluarga yang tinggal sendiri, dan biasanya disamping atau sangat dekat dari rumahnya sendiri.
3. Pengungsi yang tinggal di rumah kost/sewa
  - a. Diidentifikasi sebagai pengungsi yang menyewa rumah karena mereka harus mengungsi dari rumah bekas rumah mereka.
4. Pengungsi yang tinggal rumah-rumah penampungan di komunitas.
  - a. Diidentifikasi sebagai pengungsi yang tinggal bersama pemilik rumah penampungan ataupun yang tinggal di rumah-rumah penampungan milik rumah tangga lain.
5. Komunitas penampung yang tinggal di rumah mereka sendiri
  - a. Diidentifikasi sebagai rumah tangga yang tidak mengungsi dan tinggal di rumah mereka sendiri.
6. Komunitas penampung yang tinggal di rumah kost/sewa
  - a. Diidentifikasi sebagai rumah tangga yang tinggal menyewa/kost pada rumah yang



Tabel 1: Metadata Hasil Penilaian

Disegregasi	Tingkat Kepercayaan	Margin Kesalahan (+/-)	Ukuran Sampel	Umur Responden	Responden Perempuan
<b>Total</b>	99%	2%	4,264	44	49%
<b>Donggala</b>	95%	5%	1,213	44	58%
<b>Palu</b>	95%	5%	892	44	48%
<b>Parigi Moutong</b>	95%	5%	572	43	35%
<b>Sigi</b>	95%	5%	1,587	43	45%
<b>Rumah sendiri</b>	95%	2%	3,195	45	48%
<b>Rumah lainnya</b>	95%	7%	375	41	49%
<b>Pengungsian disamping rumah</b>	95%	7%	233	46	46%
<b>Pengungsian Informal Sewa/Kost (bukan pengungsi)</b>	95%	6%	331	42	58%
<b>Sewa/Kost (Pengungsi)</b>	95%	13%	74	39	61%
<b>Sewa/Kost (Pengungsi)</b>	95%	13%	53	40	44%

Titik-titik yang telah dipilih secara acak kemudian di unduh masuk ke dalam aplikasi “OSMAnd” yang ada pada setiap smartphone para enumerator/pencacah, kemudian mereka akan mengarah ke titik-titik yang telah ditentukan tersebut dan kemudian melakukan wawancara pada rumah tangga dapat ditemui di lokasi tersebut. Jika pengungsian yang dituju ternyata kosong, tidak dapat diakses, atau rumah tangga yang ditemui menolak untuk di wawancara, maka enumerator/pencacah diarahkan ke pengungsian terdekat dan melakukan wawancara. Jika karena sesuatu dan lain hal, enumerator/pencacah tetap tidak dapat melakukan interview, maka mereka diarahkan untuk menuju ke titik selanjutnya yang tersedia di aplikasi mereka. Sebelum proses wawancara dimulai, enumerator/pencacah akan memberikan penjelasan tujuan utama pelaksanaan survey ini, serta meminta izin resmi (formal consent) dari responden untuk berpartisipasi atas dasar sukarela. Dan jika, izin tidak diberikan, maka rumah tangga tersebut tidak akan di wawancara.

Jika enumerator/pencacah melakukan wawancara di lokasi yang memiliki lebih dari satu rumah tangga, maka rumah tangga yang akan diwawancara akan dipilih secara acak. Sebelum proses wawancara dilakukan, tim REACH akan menanyakan jumlah rumah tangga yang tinggal pada pengungsian tersebut. Dengan menggunakan metode pencuplikan Kish, masing-masing rumah tangga diberikan nomor acak.<sup>11</sup> Nomor acak ini dihasilkan dengan menggunakan aplikasi Kobo Survey, dan enumerator/pencacah melakukan wawancara dengan nomor yang sesuai. Yang diwawancara dalam setiap rumah tangga adalah kepala rumah tangga/kepala keluarga, atau seseorang yang cukup akrab dengan urusan rumah tangga sehingga dapat memberikan informasi yang sama.

Seluruh peralatan wawancara telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebelum dipergunakan di lapangan. Pelatihan tehnik wawancara bagi para ketua tim/kelompok dilakukan pada tanggal 19 Januari, dan training untuk para anggota tim/enumerator/pencacah dilakukan pada tanggal 20 s/d 21 Januari. Sementara, pengambilan data dilakukan pada tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2019. Sepanjang proses pengambilan data, masing-masing ketua tim memantau langsung timnya di lapangan ataupun dengan menggunakan grup WhatsApp sesuai dengan grupnya masing-masing. Ketua tim berhubungan langsung dengan tim penilai di Palu, yang juga melakukan kunjungan lapangan harian ke masing-masing tim untuk memastikan bahwa pelaksanaan survey telah dikelola dengan baik.

Data kemudian diolah melalui proses yang disebut sebagai “cleaning” oleh tim penilai pada tanggal 8 s/d 17 Februari, dengan bantuan tim lapangan. Data yang telah di “cleaning” kemudian diberikan bobot berdasarkan populasi menggunakan ukuran sampel kelompok populasi rumah tangga, dan dipilah berdasarkan jenis kelamin, Kecamatan, status perpindahan, dan Kabupaten.

<sup>11</sup> Kish Grid, The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods, Lewis-Beck, Bryman, and Liao, 2004.

Penilaian ini memiliki beberapa batasan yang harus diingat ketika membaca hasilnya. Rumah tangga yang tidak ingin berpartisipasi tidak diwawancarai. Selain itu, Kecamatan dan desa yang diidentifikasi oleh tim penilai sebagai terlalu berbahaya, sulit diakses, atau terlalu jauh tidak diwawancarai oleh tim penilai; Temuan-temuan penilaian tidak dapat digeneralisasikan untuk area-area tersebut. Selain itu, meskipun semua pertanyaan berasal dari sistem kluster Indonesia, beberapa di antaranya kemudian teridentifikasi sebagai tidak tepat/layak atau tidak diutarakan dengan benar untuk konteks Provinsi Sulawesi Tengah; pertanyaan-pertanyaan ini telah dihapus atau dicatat dalam temuan dan disajikan dengan cara tertentu untuk memperjelas keterbatasan pertanyaan tersebut. Seperti disebutkan di atas, beberapa kelompok populasi (khususnya yang menyewa (mengungsi dan tidak mengungsi) tidak memenuhi ambang batas rentang kepercayaan 95% dan margin kesalahan 10%, hasil ini kemudian disesuaikan dengan batas rentang kepercayaan 95% dan margin kesalahan 13%.

Selain itu, tidak ada rumah tangga yang diwawancarai yang tinggal di hunian transisi pemerintah, atau Huntara kolektif, yang sedang dibangun oleh pemerintah untuk menampung keluarga/rumah tangga yang kehilangan rumahnya dan tinggal di daerah yang tidak dapat dibangun kembali. Bangunan Huntara di Kota Palu telah diselesaikan pembangunannya dan banyak rumah tangga sedang melakukan perpindahan ke Huntara tersebut pada saat pengambilan data ini dilakukan, selain itu, hal ini juga terjadi setelah tim penilai telah sepenuhnya selesai / mencapai targetnya dalam melakukan wawancara pada Kecamatan tersebut, sehingga tidak ada rumah tangga yang tinggal di Huntara kolektif yang diwawancarai.

meskipun sebenarnya hal ini terjadi setelah tim penilai telah sepenuhnya menilai kecamatan-kecamatan ini, sehingga tidak ada rumah tangga yang tinggal di huntara koleksi diwawancarai.

## TEMUAN

Adapun temuan/hasil yang disajikan pada bagian ini dikelompokkan berdasarkan Kluster di bawah Sistem Koordinasi Palu Indonesia. Temuan tidak menyimpang cukup konsisten untuk dapat diatur analisisnya secara individual Kabupaten ataupun kelompok pengungsian; Informasi disajikan secara umum, diikuti oleh variasi dalam status geografis pengungsian, dan ketika memungkinkan, maka grafik dan peta juga ditampilkan untuk menggambarkan variasi.

## Populasi dan Metadata Responden

### Populasi

Rumah tangga pengungsi dilaporkan memiliki rasio ketergantungan sedikit lebih tinggi, hal ini menunjukkan bahwa anggota keluarga yang mungkin telah menjadi korban dan anggota keluarga yang produktif mungkin telah meninggalkan daerah tersebut untuk mencari pekerjaan di wilayah lain.<sup>12</sup>

Tabel 2: Informasi rumah tangga

Disagregasi	Umur Kepala Keluarga (rata-rata)	Kepala Keluarga Perempuan (%)	Rasio Ketergantungan
Total	46	11%	0.7
Donggala	47	14%	0.8
Palu	46	14%	0.7
Parigi Moutong	44	5%	0.7
Sigi	46	7%	0.7

<sup>12</sup> Rasio ketergantungan umur merupakan rasio antara anggota keluarga dengan kelompok umur tidak produktif (umumnya antara 0-15 dan >65 tahun) yang dibagi dengan anggota keluarga kelompok umur produktif (16 s/d 64 tahun). Nilai ini memberikan gambaran bagaimana ketergantungan keluarga/rumah tangga kepada anggotanya yang produktif. Nilai yang besarnya lebih dari 1 mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi, sebaliknya jika nilainya dibawah 1 maka ketergantungan keluarga tersebut juga semakin rendah. Untuk dapat mengakomodasi data yang dikumpulkan dari hasil survey ini, maka rasio ketergantungan dihitung dengan menggunakan kelompok umur 0-17 dan >60 tahun untuk anggota rumah tangga yang tidak produktif dan kelompok umur 18 s/d 59 tahun sebagai anggota keluarga produktif.

Disagregasi	Umur Kepala Keluarga (rata-rata)	Kepala Keluarga Perempuan (%)	Rasio Ketergantungan
Rumah Sendiri	47	12%	0.7
Rumah Lainnya	43	14%	0.7
Pengungsian di samping rumah	47	6%	0.8
Pengungsian Informal Sewa/kost (bukan pengungsi)	44	10%	0.9
Sewa/kost (Pengungsi)	41	8%	0.8
Sewa/kost (Pengungsi)	41	15%	0.8

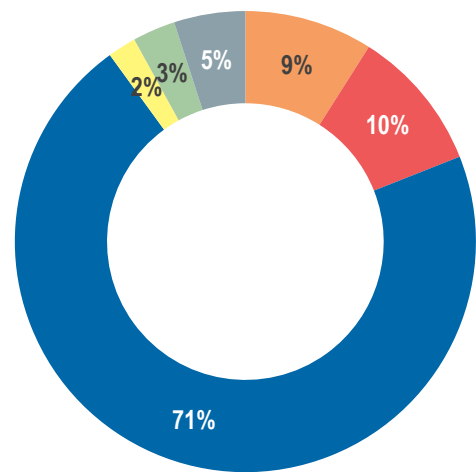
## Pengungsian dan Perlindungan

Empat bulan setelah kejadian bencana, ditemukan bahwa mayoritas rumah tangga tidak mengungsi: 74 % rumah tangga tetap tinggal di rumahnya masing-masing atau menyewa rumah baik sebelum ataupun sesudah bencana. Selanjutnya, sekitar 10% rumah tangga Selanjutnya 10% Rumah Tangga yang diwawancarai ditampung oleh rumah tangga lain atau tinggal di rumah kosong milik rumah tangga lain. Menurut informasi dari tim lapangan, rumah yang mereka tinggali tersebut biasanya merupakan milik teman ataupun sanak family. Rumah tangga ini umumnya ditemukan dalam situasi yang lebih stabil dan kurang menyatakan keinginan untuk pindah atau mengubah situasi hidup saat ini dalam waktu dekat. Sisanya sebanyak 26% rumah tangga hidup diberbagai lokasi pengungsian; 9% diantaranya tinggal di pengungsian informal seperti kamp, 5% lagi mengungsi di sebelah rumah asli mereka, dan 2% lainnya mengungsi dengan menyewa rumah sebagai penampungan sementara.

Sebagian besar rumah tangga yang menyewa tinggal di Palu, dimana terdapat sekitar 11% rumah tangga menyewa tempat penampungan. Selanjutnya, di Kabupaten lain, sebahagian besar rumah tangga yang menyewa tempat penampungan, tinggal di daerah pinggiran kota seperti di Kabupaten Donggala (Banawa, Sindue) Sigi (Dolo, Marawola) dan Parigi (Parigi), tetapi rumah tangga tersebut hanya mewakili sebagian populasi yang ada disana.

Proporsi rumah tangga yang mengungsi bervariasi menurut lokasinya: dimana, lebih dari sepertiga (34%) rumah tangga di Donggala tinggal di rumah mereka, kondisi yang sama juga terjadi baik di Sigi (28%) dan Kota Palu (26%). Di Parigi Moutong, yang jauh lebih sedikit terkena dampak bencana, hanya 6% rumah tangga yang mengungsi. Selanjutnya, populasi pengungsi memiliki kecenderungan untuk terkumpul/terkonsentrasi pada area/wilayah tertentu, terutama untuk wilayah yang letaknya jauh dari Kota Palu atau tempat-tempat yang terkena dampak likuifaksi termasuk Dolo Selatan, Sindue, Sirenja, Balaesang, kecamatan Sigi Biromaru. Sekitar 10% rumah tangga di Sigi, Donggala, dan Palu terpaksa mengungsi di permukiman informal, yang jumlahnya mirip dengan data yang telah didokumentasikan oleh pemerintah pada bulan Desember 2018.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa situasi pengungsian sebagian besar telah stabil sejak akhir 2018, dan kondisinya tidak akan berubah secara dramatis dalam waktu dekat.

Gambar 1: % rumah tangga berdasarkan pengungsian saat ini/ lokasi tinggalnya

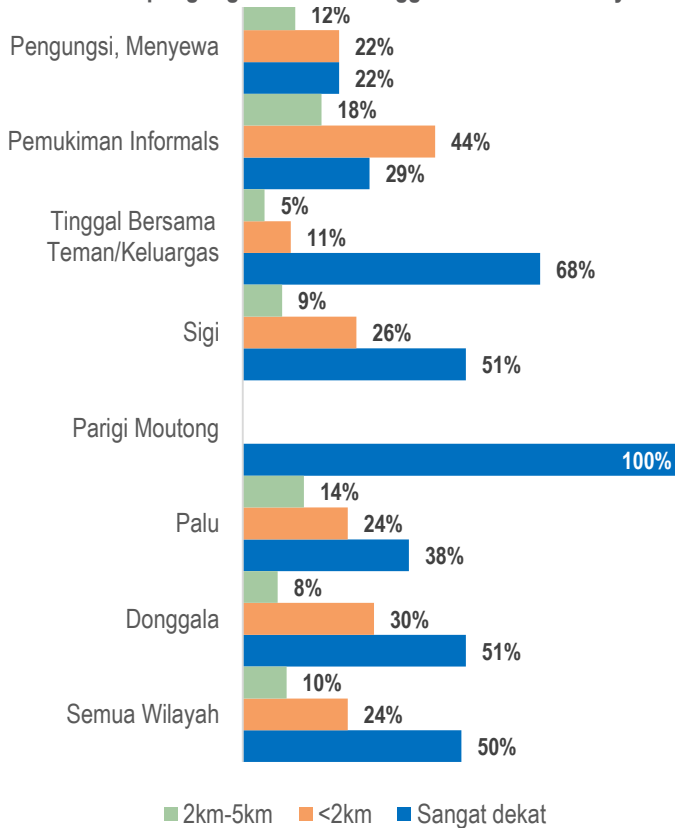


- Pemukiman Informal
- Lainnya
- Tinggal Bersama Teman/Keluarga
- Rumah milik sendiri
- Pengungsi, Menyewa
- Bukan Pengungsi, Menyewa
- Penampungan Sementara Dekat Rumah

<sup>13</sup> UNOCHA, Humanitarian Snapshot of Central Sulawesi, 20 December 2018.

## Rumah tangga pengungsi

Gambar 2 Jarak pengungsian rumah tangga dari rumah asalnya



Sebagian besar rumah tangga yang terpaksa mengungsi memilih tinggal tidak jauh dari rumahnya masing-masing, biasanya di lokasi yang dianggap aman terdekat; 50% rumah tangga yang mengungsi tinggal disamping ataupun sangat dekat dengan rumahnya masing-masing. Sementara 24% lainnya berada dalam jarak kurang dari 2 km dari rumah asli mereka, dan 10% berada antara 2 km dan 5 km. Sisanya tinggal lebih jauh dari 5 km atau tidak yakin jaraknya.

Dengan menganalisa kondisi status pengungsian rumah tangga tersebut, maka terdapat beberapa pola yang dapat diamati: Rumah tangga yang berada di pengungsian informal merupakan kelompok yang telah berpindah jauh dari lokasi rumah aslinya, sementara rumah tangga yang mengungsi pada rumah teman ataupun sanak famili jaraknya lebih dekat ke rumah asli mereka. Hal ini terkonfirmasi oleh tim lapangan pada saat pengambilan data belangsung, yang mencatat bahwa banyak pengungsi telah berpindah ke rumah teman ataupun keluarga terdekat. Rumah tangga yang menyewa mengungsi lebih jauh, hal

ini konsisten dengan hasil pengamatan dimana rumah sewa sangat terbatas, sehingga pengungsi tersebut harus mencari rumah sewa lebih jauh. Kebanyakan rumah tangga yang berada di pengungsian informal mengungsi bersama komunitasnya. Korban tsunami biasanya mengungsi ke daerah lebih jauh ke dalam (daratan) dengan elevasi yang lebih tinggi dari rumah asalnya, sementara rumah tangga yang terkena dampak likuifaksi umumnya mengungsi ke area terdekat yang tidak terkena likuifaksi.

Meskipun penilaian tidak menanyakan secara spesifik jenis bencana apa yang menyebabkan mereka mengungsi, adalah hal yang mudah untuk memperkirakan jenis bencana yang menyebabkan mereka mengungsi, yakni cukup dengan melihat asal Kecamatan, Kabupaten ataupun Kotanya.

Rumah tangga yang dipindahkan di Kota Palu, yang paling terkena dampak tsunami dan pencairan, melaporkan telah bergerak lebih jauh daripada di Sigi dan Donggala, di mana sebagian besar penduduknya terkena dampak gempa bumi. Di Parigi Moutong, Kecamatan yang paling sedikit terkena dampaknya, semua rumah tangga terlantar dilaporkan tinggal di dekat bekas rumah mereka. Pengungsi di Kota Palu, yang umumnya terdampak tsunami dan likuifaksi, dilaporkan lebih banyak berpindah jauh jika dibandingkan dengan pengungsi yang berada di Sigi dan Donggala, yang kebanyakan pengungsi terdampak gempa bumi. Di Parigi Moutong, Kecamatan yang paling sedikit terdampak, seluruh pengungsi dilaporkan tinggal sangat dekat dengan bekas rumah mereka.

## Rumah tangga yang tidak mengungsi

Hanya 6% rumah tangga yang tidak mengungsi dan tetap tinggal di rumah atau rumah sewa mereka sendiri dilaporkan menampung pengungsi. Namun hal ini mewakili hingga 18% dari populasi yang mengungsi, meskipun proporsi pastinya tidak jelas karena banyak rumah tangga yang mengungsi mungkin telah membagi anggota keluarganya dan tersebar pada beberapa rumah, dan banyak diantara mereka yang tinggal di rumah-rumah yang

berbeda mungkin saja hidup sendirian dan tanpa adanya dukungan dari pemilik rumah.<sup>14</sup> Rata-rata anggota rumah tangga yang tinggal rumah penampungan keluarga lain mencapai 3 orang, sedikit lebih dari setengah ukuran rata-rata rumah tangga yang menjadi tuan rumah (5).

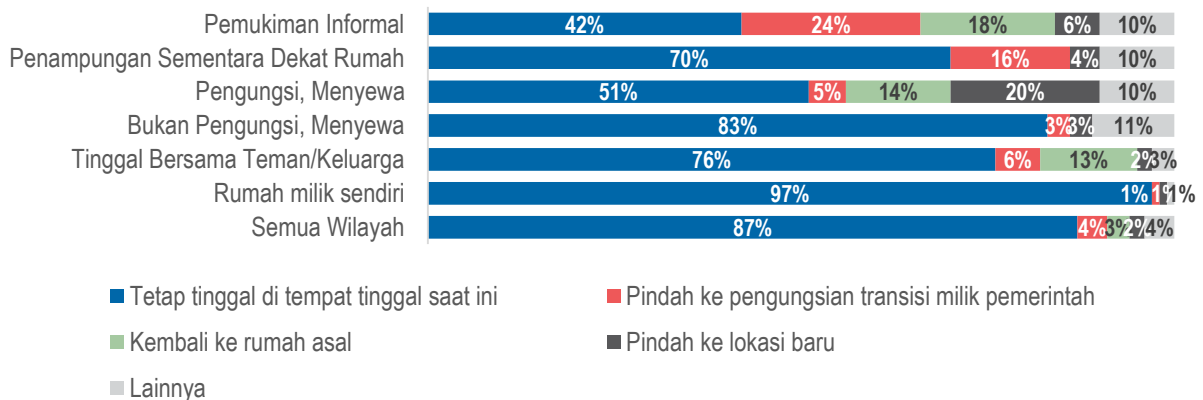
Sekitar 8% rumah tangga di Kota Palu lebih cenderung dapat menampung pengungsi jika dibandingkan dengan rumah tangga di Kabupaten Donggala yang hanya sekitar 6% atau di Kabupaten Sigi yang hanya sekitar 5%, dan apalagi jika dibandingkan dengan Parigi Moutong. Namun, menariknya bahwa ukuran rumah tangga pengungsi di Parigi Moutong lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini menunjukkan, hanya sedikit rumah tangga yang mau menanggung/mensupport pengungsi yang ada di Kabupaten tersebut.

Rumah tangga yang mengungsi disamping rumah mereka sendiri lebih cenderung untuk menampung rumah tangga pengungsi lainnya dibandingkan dengan penduduk yang tidak mengungsi, yang juga bermakna bahwa dampak bencana tidak terdistribusi secara merata, dan bagi mereka yang terdampak oleh satu sektor kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan pada sektor lainnya juga.

### Motive Perpindahan

Sebagian besar rumah tangga, terlepas dari status pengungsiannya, (87%) melaporkan ingin tetap tinggal di lokasi mereka saat ini dalam enam bulan setelah pengumpulan data. Meskipun alasan ini juga tertinggi bagi mereka yang tinggal di rumah mereka sendiri (94%), sebagian besar rumah tangga yang mengungsi juga lebih untuk tetap tinggal di lokasi saat ini (58%). Mungkin ada banyak alasan mengapa pilihan tersebut menjadi yang tertinggi, tetapi kemungkinan besar terkait dengan kurangnya alternative tempat tinggal.

**Gambar 3: Keinginan untuk berpindah dalam 6 bulan ke depan paska pengambilan data, berdasarkan status pengungsiannya**



Kelompok rumah tangga yang dilaporkan paling tidak ingin tinggal di lokasinya saat ini adalah kelompok pengungsi yang tinggal pada pemukiman informal. Meskipun banyak rumah tangga tetap ingin tinggal dilokasi saat ini, hampir seperempat rumah tangga dilaporkan berniat untuk pindah ke Huntara Kolektif yang dibangun oleh pemerintah, dan kurang dari seperlima yang ingin kembali ke rumahnya masing-masing. Bagi mereka yang tinggal di tenda di luar rumah mereka, sebagian besar (70%) dilaporkan sangat ingin untuk tetap tinggal dimana mereka berada saat ini, 16% ingin pindah ke Huntara milik pemerintah, dan sisanya tidak tau. Anehnya hanya sedikit pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya sendiri, yang mungkin saja merupakan hasil dari berbagai macam faktor termasuk tingkat stress dan kurangnya bahan baku untuk membangun rumah.

Anehnya, sedikit pengungsi yang ingin kembali ke lokasinya saat ini; hal ini mungkin karena rumah yang mereka tinggali telah hancur dan sangat sedikit yang tersedia untuk alternative tempat tinggal; 58% rumah tangga melaporkan bahwa rumah mereka telah hancur ataupun rusak parah, 35% melaporkan rumahnya mengalami

<sup>14</sup> Jumlah ini dihitung dengan cara : 6% of rumah tangga bukan pengungsi menampung pengungsi setara dengan 4,5% dari total populasi, yaitu sekitar 18% dari populasi pengungsi (dengan asumsi bahwa semua anggota dari setiap rumah tangga yang mengungsi bukan merupakan satu rumah tangga yang terpisah dan menumpang di rumah tangga lainnya).



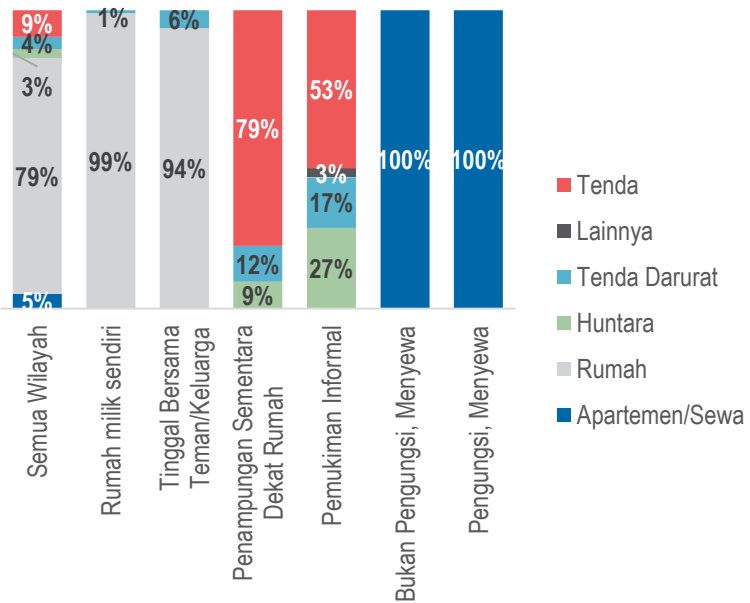
kerusakan berat, dan hanya 19% yang mengalami rusak ringan. Karena sedikitnya ruang yang tersedia di Huntara milik pemerintah, maka kemungkinan besar rumah tangga yang tidak dapat pindah ke tempat penampungan sementara justru ingin tinggal di tempatnya saat ini karena tidak adanya pilihan yang lebih baik.

## Pengungsian

### Tipe Shelter

Tipe tempat tinggal pengungsi saat ini sebagian besar merefleksikan kondisi kehidupan para pengungsi; mayoritas rumah tangga yang tinggal di rumah-rumah mereka atau tinggal bersama dengan rumah tangga lain (99% dan 94%, berurutan) dilaporkan tinggal di rumah, penyewa tinggal di rumah yang mereka sewa (100% baik bagi mereka yang mengungsi ataupun tidak mengungsi), sementara mayoritas rumah tangga yang mengungsi di samping rumah mereka sendiri ataupun pada pemukiman informal tinggal di dalam tenda-tenda pengungsian.

Gambar 4: Tipe tempat tinggal, berdasarkan status pengungsian



Hasil kajian ini, menunjukkan bahwa tidak adanya rencana pemerintah untuk melakukan relokasi yang berskala besar ataupun rekonstruksi bagi rumah-rumah yang hancur, banyak rumah tangga telah memulai membangun kembali rumahnya untuk jangka waktu yang panjang. Empat bulan setelah kejadian bencana, hanya 53% rumah tangga yang tinggal pada penampungan informal masih tinggal di tenda-tenda; 27% tinggal di lokasi pengungsian sementara baik yang mereka telah membangun sendiri ataupun bantuan dari LSM, dan 17% masih tinggal di tenda/pengungsian darurat yang dibuat dari material apapun yang tersedia di lokasi. Tim lapangan di selatan Donggala dan Selatan Sigi menunjukkan bahwa kebanyakan pengungsi telah membangun atau meningkatkan kualitas tempat tinggal darurat/sementaranya. Yang lebih memprihatinkan adalah rumah tangga yang tinggal di samping rumah mereka sendiri, terdapat hampir 80% rumah tangga tersebut masih tinggal di dalam tenda, sementara kurang dari 10% yang tinggal di pengungsian dengan kondisi yang lebih baik.

### Penggusuran

Sekitar 2% dari total rumah tangga dilaporkan berisiko untuk di gusur dari lokasi tinggalnya saat ini. Selain para penyewa, sekitar 70% dari mereka dilaporkan berisiko untuk digusur karena kekurangan uang, persentase rumah tangga yang melaporkan hal ini relative rendah.

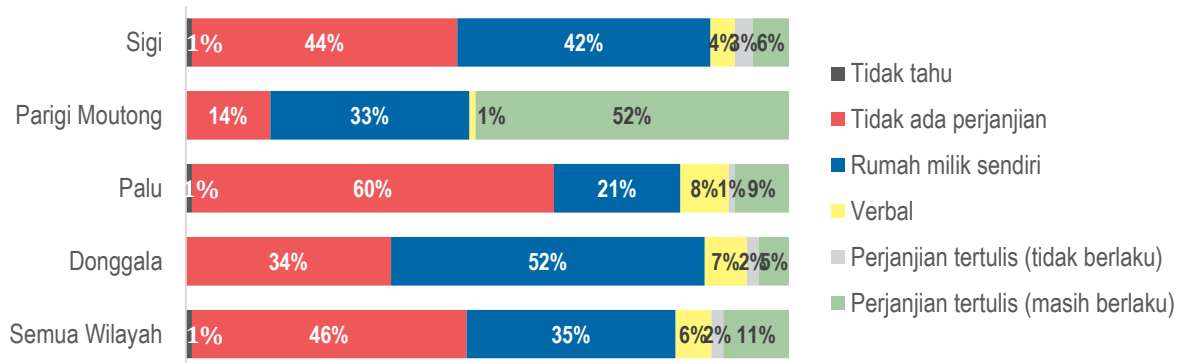
Sekitar setengah dari dari rumah tangga yang melaporkan berisiko mengalami penggusuran melaporkan bahwa baik Pemerintah (56%) ataupun pemilik lahan (52%) yang meminta mereka untuk pindah, ke dua alasan tersebut merupakan alasan utama rumah tangga menghadapi penggusuran.

Yang memprihatinkan, adalah adanya 11% rumah tangga menghadapi penggusuran karena kekhawatiran akan keselamatan mereka dari komunitas tuan rumah yang tidak menerima kehadiran mereka, hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada isu mengenai ketegangan antar masyarakat karena proses pengungsian yang lama.

## Sewa dan Kepemilikan

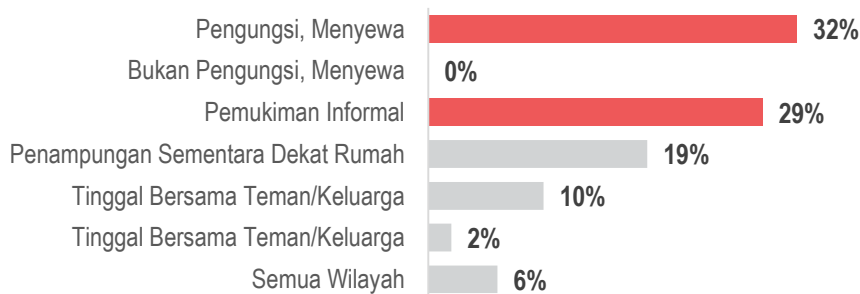
Pengaturan sewa-menyewa perumahan di Indonesia terbilang rumit, dan kuesioner survei tidak cukup menangkap kompleksitas perjanjian sewa-menyewa rumah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Banyak kelompok etnis di Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki tanah namun mereka tetap dapat tinggal di lokasi tersebut walaupun tanpa adanya perjanjian resmi atas tanah anggota keluarga lainnya, yang umumnya memiliki

Gambar 5: Perjanjian kepemilikan rumah menurut Kabupaten/Kota



luas lahan yang dibagi/digunakan oleh seluruh warga yang ada didesa atau keluarga besar.<sup>15</sup> Hanya sekitar sepertiga rumah tangga yang melaporkan menjadi pemilik rumah mereka. Sebagian besar orang yang tinggal di rumah mereka sendiri (78%), tinggal di tenda di luar rumah mereka (46%), atau di pemukiman (63%) tidak memiliki perjanjian apapun untuk rumah di tanah mereka. Tingkat tidak adanya perjanjian sewa cukup tinggi di Palu, di mana ikatan dengan tanah adalah yang terlemah dan banyak penduduk merupakan pendatang. Kepemilikan rumah di Donggala dan Sigi (masing-masing sekitar 52% dan 42%) adalah yang tertinggi.

Gambar 6: % Rumah tangga yang melaporkan kehilangan dokumen kepemilikan rumah menurut Status Pengungsannya



Sebagian besar rumah tangga (94%) melaporkan memiliki semacam dokumen atau perjanjian sebagai bukti kepemilikan tempat tinggalnya, atau mengenal orang-orang yang memilikinya yang dapat membantu mereka membuktikan bahwa mereka dapat tinggal di

sana. Namun, sekitar 6% rumah tangga melaporkan kehilangan dokumen mereka karena bencana; Hal ini menyebabkan sekitar 29% rumah tangga terpengaruh secara tidak proporsional. Karena sifat kepemilikan rumah informal yang umum di sebagian besar wilayah Indonesia, para rumah tangga pengungsi tersebut kemungkinan akan menghadapi masalah dalam prose bermukim kembali dan memerlukan dukungan untuk dapat kembali hidup di tanah mereka.

Semua ini menunjukkan bahwa kepemilikan cenderung menjadi masalah yang lebih besar di Kota Palu di mana sebagian besar penduduk tidak memiliki ikatan dengan tanah dan kemungkinan besar juga tidak memiliki jaringan formal atau informal untuk memastikan kepemilikan tanahnya. Perhatian khusus sebaiknya diberikan kepada pengungsi di daerah-daerah ini dan mereka yang mungkin mengalami kesulitan mengidentifikasi rumah lama mereka atau tempat tinggal baru.

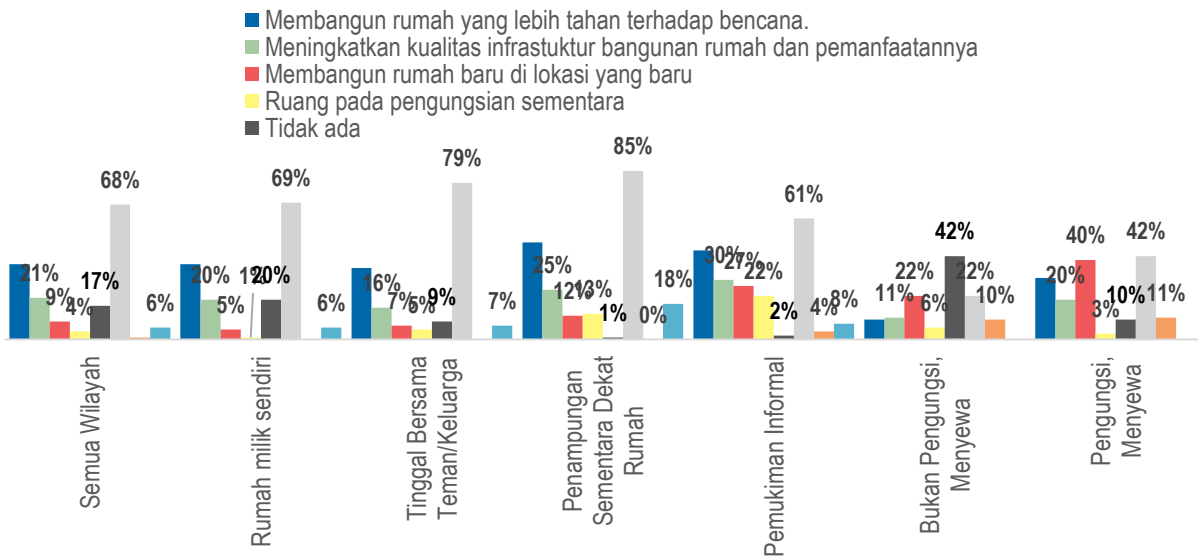
<sup>15</sup> Mulyoutami, Martini, Khususiyah, Isnurdiansyah and Suyanto, Gender, mata pencaharian and tanah di Sulawesi Selatan dan Tenggara, Working Paper no. 158, 2012.

## Bantuan Pengungsian dan Rekonstruksi

Sebagian besar rumah tangga ingin membangun kembali atau memperbaiki rumah mereka dan memulihkan keadaan kehidupan mereka sebelumnya. Lebih dari dua pertiga rumah tangga (67%) melaporkan bahwa rumah mereka telah rusak atau hancur karena bencana. Ini termasuk rumah-rumah yang benar-benar hancur ataupun yang mengalami kerusakan ringan maupun berat. Ketika ditanya tentang tiga prioritas jenis dukungan yang mereka inginkan terhadap rumah awalnya, lebih dari dua pertiga rumah tangga (68%) tersebut melaporkan bahwa mereka yang ingin membangun kembali atau memperbaiki rumah mereka dalam 6 bulan ke depan, sementara 38% ingin meningkatkan kualitas tempat tinggalnya menjadi lebih tahan bencana, dan 25% ingin untuk meningkatkan layanan dasar yang ada terkait air bersih dan kelistrikan. Rumah tangga yang tinggal di permukiman informal menyatakan memiliki keinginan yang lebih rendah dalam membangun kembali atau memperbaiki rumah mereka, hal ini mungkin lebih karena mereka memiliki pilihan lain, termasuk pindah ke hunjara kolektif yang dibangun oleh pemerintah.

Hanya penyewa yang menyatakan keinginan untuk pindah ke lokasi yang benar-benar baru (40% pengungsi dan 22% bukan pengungsi), hal ini tidaklah mengejutkan mengingat para penyewa akan lebih cenderung pindah ke tempat tinggal yang baru jika rumah yang mereka sewa pertama mereka rusak. Hal ini didukung oleh kondisi geografis; keinginan untuk membangun kembali rumah-rumah yang ada ditemukan tertinggi di Sigi dan Donggala (masing-masing mencapai 74% dan 80% dari total rumah tangga pengungsi) di mana sewa-menyewa rumah sangat jarang, namun untuk Kota Palu dan Parigi Mautong persentasenya lebih rendah (65% dan 31%).

Gambar 7: Bantuan yang paling diinginkan untuk meningkatkan situasi perumahan



## Perlindungan

Sejumlah kecil masalah perlindungan disajikan pada bagian ini untuk memberikan informasi yang luas untuk membantu memandu respons dalam hal perlindungan. Namun, karena sifatnya yang sensitif, direkomendasikan agar organisasi-organisasi perlindungan melakukan penilaian khusus dan lebih detail tentang masalah-masalah ini.

### Perlindungan hak-hak perempuan

Wanita hamil atau menyusui dilaporkan terdapat sekitar 16% pada rumah tangga yang mengungsi. Kondisi ini sedikit lebih tinggi bagi rumah tangga yang mengungsi. Hal ini juga didukung oleh penelitian lain yang

menemukan bahwa keluarga/rumah tangga pengungsi sering memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi karena situasi/kondisi yang gampang membuat stres.<sup>16</sup>

### Perlindungan Anak

Sekitar 3% rumah tangga melaporkan bahwa mereka memiliki setidaknya satu anak dalam rumah tangganya yang terpisah dari pengasuh normal/orang tuanya. Ini serupa di sebagian besar kecamatan, meskipun di Kecamatan Mantikulore secara signifikan lebih tinggi (8%). Hal ini mungkin disebabkan karena Mantikulore adalah kecamatan yang paling padat penduduknya yang disurvei, dan terletak di daerah perkotaan, dan lebih mungkin memiliki keluarga/rumah tangga yang bersedia untuk menampung anak-anak yang terpisah yang tidak dapat menemukan keluarganya.<sup>17</sup>

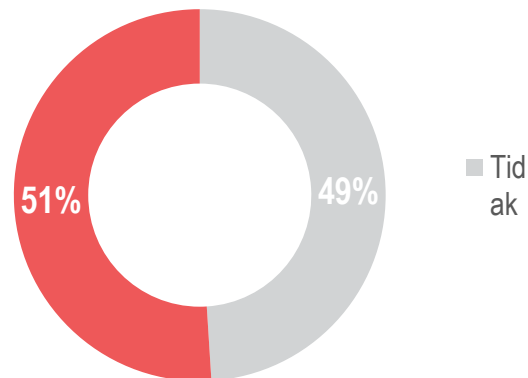
### Dukungan Psikososial

Karena sifat teknis dalam mendiagnosis stres paska trauma dan trauma lainnya, tim penilai mengajukan pertanyaan proxy: jika ada anggota rumah tangga yang masih mengalami stress, termasuk kesulitan tidur, mimpi buruk, kesulitan emosional, atau perubahan suasana hati sebagai akibat langsung bencana. Lebih dari setengah (51%) rumah tangga melaporkan bahwa setidaknya mereka memiliki satu orang anggota yang masih mengalami stress; hal ini bahkan lebih tinggi dari apa yang telah dilaporkan Palang Merah Indonesia (PMI) pada bulan Desember 2018, dimana 9% responden dilaporkan mengalami gejala mirip stress, meskipun terdapat perbedaan metodologi yang dipergunakan.<sup>18</sup> Stres yang terpendam akibat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mungkin dapat memberikan gambaran sedikit mengenai alasan mengapa rumah tangga/keluarga kurang bersedia untuk kembali kerumahnya, bahkan hal ini lebih rendah dari pada yang diharapkan.

### Disabilitas, Manula, Minoritas

Terdapat sekitar 3% dari total rumah tangga yang melaporkan bahwa mereka memiliki anggota keluarga yang cacat baik fisik atau mental. Umumnya, hal ini konsisten di seluruh wilayah geografis dan kelompok demografis, meskipun untuk Kecamatan Labuan, ternyata memiliki proporsi yang cukup tinggi (11%) dimana rumah tangga melaporkan memiliki anggota keluarga yang cacat. Setiap upaya rekonstruksi nantinya diharapkan tetap mempertimbangkan kondisi populasi seperti ini kedepannya.<sup>19</sup>

Gambar 8: Rumah tangga dengan sedikitnya satu orang anggota keluarga yang mengalami tekanan emosional (mimpi buruk, kesulitan tidur, stres, gugup, dll.) setelah bencana



### Air bersih, Sanitasi, dan Kebersihan

#### Air Bersih

Berbeda dengan hasil kajian sebelumnya, air bersih, sanitasi dan kondisi kebersihan tampaknya telah meningkat /membaik sejak kejadian bencana. Namun demikian, sumber-sumber air bersih lebih sudah lebih banyak yang tersedia, beberapa layanan umum yang tersedia belum cukup untuk melayani keseluruhan populasi yang ada.

<sup>16</sup> Parlow, Birth and Fertility during War: Afghanistan from 2007 to 2010.

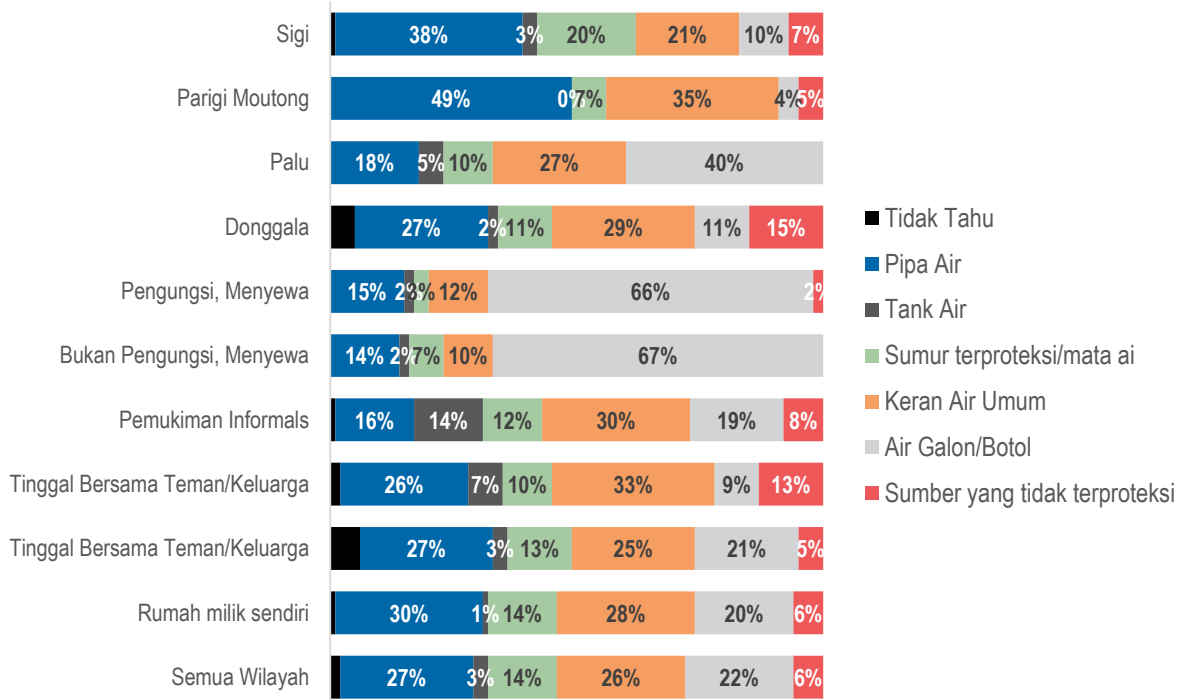
<sup>17</sup> UNICEF, Displaced families face after math of Indonesia earthquake and tsunami, 17 October 2018

<sup>18</sup> UNOCHA, Saura Komunitas 2, December 2018. PMI menerima umpan balik dari 225 orang melalui berbagai mode komunikasi, termasuk: hotline PMI, acara talkshow radio interaktif, disiarkan di Radio, Nebula dan RRI saluran nasional, relawan PMI bekerja secara langsung dengan orang-orang di semua daerah yang terkena bencana di Sulawesi Tengah dan ponsel menggunakan KOBO Collect, alat survei digital.

<sup>19</sup> Humanity and Inclusion Indonesia, Disability Checklist (Revised), 2017.

Hampir semua rumah tangga mendapatkan air dari sumber yang lebih baik, baik melalui pipa yang disalurkan langsung ke rumah-rumah, dari sumur atau mata air yang dilindungi, ataupun sumur bor umum (lihat tabel di bawah).<sup>20</sup> Hanya 6% rumah tangga yang melapor bahwa mereka bergantung pada sumber air yang tidak terlindungi, meskipun hal ini biasanya terjadi untuk rumah tangga yang tinggal di tenda diluar rumahnya (13%), di seluruh kelompok populasi di Kabupaten Donggala (15%). Terlepas dari sumbernya, 95% rumah tangga di semua wilayah melaporkan bahwa mereka minum air yang diolah dan aman untuk diminum.

Gambar 9: Sumber utama air bersih berdasarkan Kabupaten/Kota dan status pengungsian



Rumah tangga di Kota Palu sebagian besar mengandalkan air botolan atau dari kios, seperti halnya populasi yang menyewa, mencerminkan populasi yang lebih bergantung pada pasar. Populasi di lokasi pengungsian sebagian besar mendapatkan air dari sumber-sumber publik seperti sumur bor atau keran, yang dimanfaatkan oleh 30% rumah tangga yang tinggal di permukiman informal dan 33% dari mereka yang tinggal di tenda di luar rumah mereka. Namun, penggunaan sumber air komunal telah menyebabkan kelangkaan air di beberapa lokasi pengungsian; hanya 73% rumah tangga yang tinggal di tenda di sebelah rumah mereka, dan 72% di permukiman informal melaporkan memiliki cukup air untuk semua kebutuhan sehari-hari (memasak, membersihkan, mencuci, dll.) dibandingkan dengan 87% dari rata-rata populasi. Selain itu, 19% rumah tangga di situs informal dan 9% rumah tangga di tenda di luar rumah mereka juga mendapatkan sebagian besar air mereka dari air botolan atau kios, hal ini tentunya membuat mereka menjadi bergantung pada bantuan dan pasar untuk pemenuhan sebagian besar kebutuhan air sehari-hari mereka. Upaya yang cukup signifikan dilakukan oleh UNICEF dan LSM lainnya dalam meningkatkan akses air bagi para pengungsi di lokasi pengungsian terutama di permukiman informal pada tiga bulan pertama aksi tanggap darurat sehingga menghasilkan peningkatan pasokan air untuk 52.889 jiwa pengungsi.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> UNICEF, "JMP: Drinking Water," 2017

<sup>21</sup> UNICEF, Indonesia Humanitarian Situation Report No. 5, 9 December 2019.



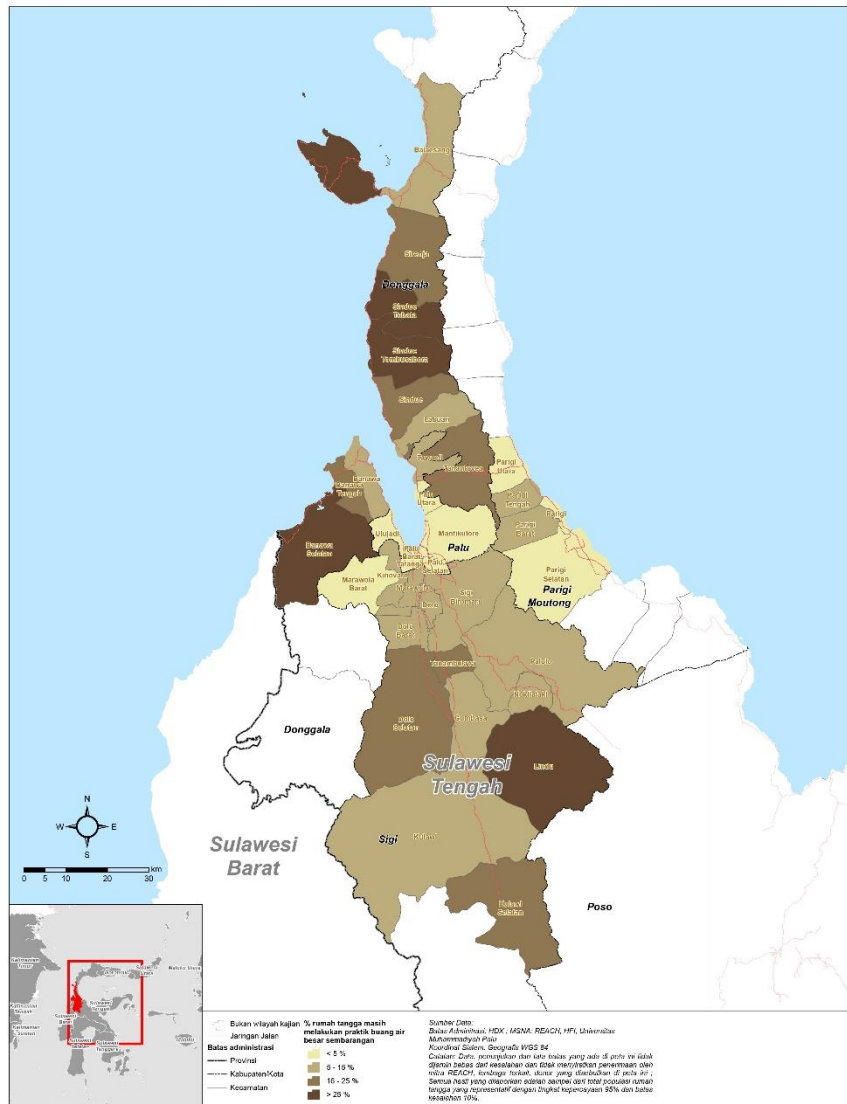
## Sanitasi

Secara umum, kondisi sanitasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah membaik sejak masa awal kejadian bencana, ketika kekhawatiran terkait WASH, khususnya di permukiman/pengungsian informal, menjadi perhatian utama.<sup>22</sup> Meskipun tidak dapat dibandingkan secara langsung, survey pertama DTM menunjukkan bahwa hampir 40% dari semua lokasi pengungsian informal tidak memiliki toilet. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara responden rumah tangga, sekitar 71% rumah tangga menggunakan jamban individu untuk buang air besar, dan 18% lainnya menggunakan jamban umum. Namun, 9% rumah tangga masih melaporkan melakukan buang air besar sembarangan, termasuk 8% dari mereka yang tinggal di rumah mereka sendiri, yang memprihatinkan, karena hal ini akan meningkatkan risiko penyebaran penyakit.<sup>23</sup>

Walaupun praktik buang air besar sembarangan hanya dilaporkan oleh proporsi rumah tangga yang relative kecil, namun hal ini ternyata menjadi masalah utama bagi para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda di luar rumah (27%), sementara sebahagian besar dukungan WASH sangat terbatas pada daerah yang menjadi pusat-pusat lokasi pengungsian saja, namun untuk pengungsian yang letaknya tersebar tidak terjangkau oleh dukungan terkait WASH. Hal ini jauh lebih baik daripada data baseline yang menunjukkan bahwa peningkatan sanitasi di Provinsi Sulawesi Tengah hanya mencapai 80% dari total populasi, yang mengisyaratkan bahwa kedua upaya pemasangan jamban umum/komunal setelah kejadian gempa bumi telah memberikan dampak yang signifikan.<sup>24</sup>

Laporan yang sama mencatat bahwa daerah pedesaan, seperti Donggala dan Sigi, memiliki tingkat peningkatan kondisi sanitasi yang lebih buruk, yang tercermin dari data penilaian; dimana 23% rumah tangga Donggala melaporkan melakukan buang air besar sembarangan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kombinasi budaya/kebiasaan dan kurangnya infrastruktur. Peta berikut menunjukkan bahwa praktik buang air besar sembarangan cenderung lebih umum dilakukan di daerah yang jauh dari Kota Palu, termasuk Dolo Selatan, Gumbasa, Kulawi Selatan, dan Lindu.

Peta 2: Praktik buang air sembarangan menurut Kecamatan

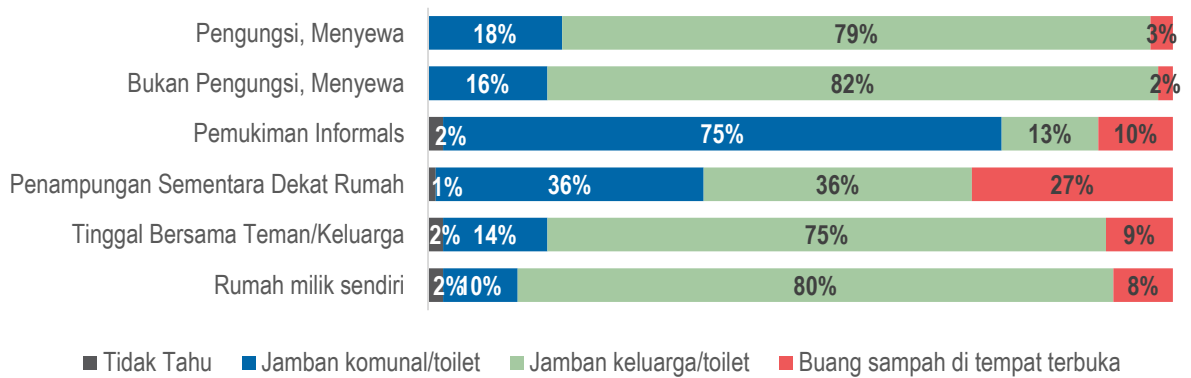


<sup>22</sup> IOM, Displacement Tracking Matrix: Central Sulawesi Round 1, 20 October 2018.

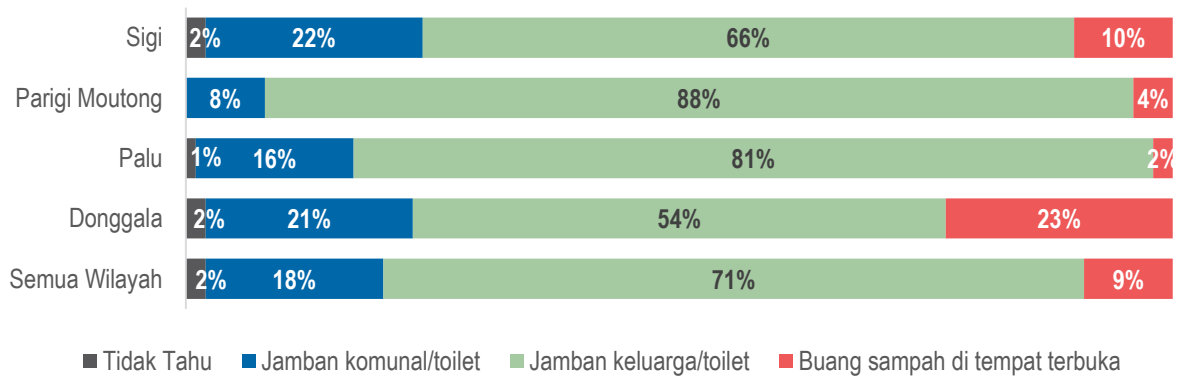
<sup>23</sup> WHO, "Sanitation," 2017.

<sup>24</sup> WHO South-East Asia, Situation Analysis: Earthquake & Tsunami, Sulawesi, Indonesia, October 2017.

Gambar 10: Metode buang air besar menurut status pengungsinya



Gambar 11: Metode buang air besar menurut Kabupaten/Kota



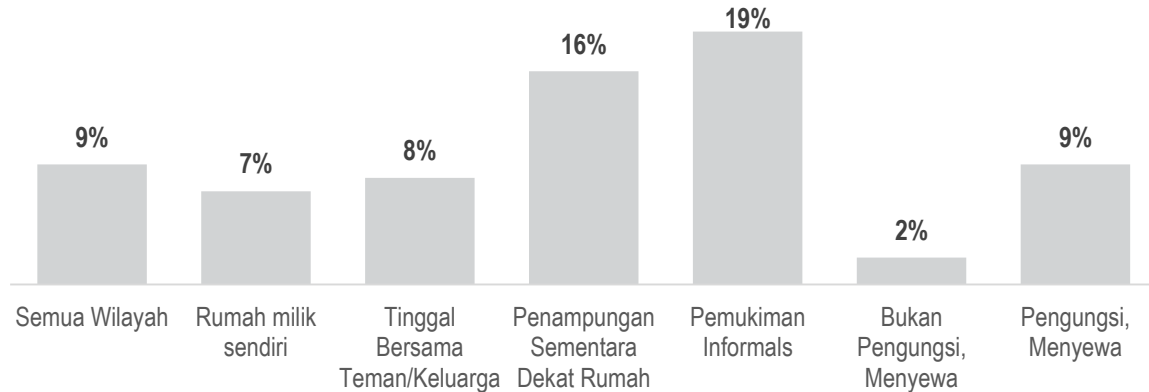
Jamban komunal lebih lazim digunakan oleh para anggota rumah tangga di permukiman informal (75%), menunjukkan bahwa intervensi program WASH kemanusiaan telah berhasil mengurangi praktik buang air besar sembarangan di permukiman informal.<sup>25</sup> Selanjutnya, setiap jamban komunal, rata-rata melayani 13 rumah tangga, meskipun pada permukiman informal jumlah rumah tangganya rata-rata dua kali lebih banyak (26) – yang tertinggi tercatat di Palu Barat (45), dimana sebagian besar merupakan penduduk dari Balaroa yakni wilayah yang terkena zona likuifaksi, yang mengungsi di permukiman informal, selain itu, jumlah yang tinggi juga tercatat di Kulawi dan Banawa, dimana permukiman informal besar lainnya berada. Terlepas dari beban keseluruhan, dilaporkan bahwa sebagian besar jamban umum telah memiliki penerangan dan kunci yang memadai di pintunya. Selain itu, terdapat juga 12% rumah tangga yang sama melaporkan bahwa mereka menggunakan toilet umum yang sudah terpisah untuk laki-laki dan perempuan.

### Kebersihan

Sebagian besar rumah tangga melaporkan bahwa mereka memiliki fasilitas cuci tangan di rumahnya, baik dari alat penuang (59%) atau ember (32%). Hanya 9% rumah tangga melaporkan tidak memiliki fasilitas cuci tangan. Kondisi ini termasuk tinggi untuk kategori pengungsian (lihat grafik di bawah), khususnya bagi mereka yang tinggal di permukiman informal (19%) dan yang tinggal di tenda-tenda di luar rumah mereka (16%). Selain itu, 92% rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan, juga melaporkan bahwa air tersedia untuk cuci tangan, meskipun hanya 64% yang melaporkan bahwa mereka memiliki sabun.

<sup>25</sup> UNICEF, Indonesia Humanitarian Situation Report No. 5, 9 December 2019.

Gambar 12: % of Rumah tangga yang tidak memiliki akses ke fasilitas cuci tangan menurut status pengungsinya



Sebagian besar rumah tangga melaporkan bahwa sampah di daerah mereka dibuang dengan cara pembakaran (49%). Seperempat bagian (24%) rumah tangga membuang sampahnya ke lokasi khusus penampungan sampah, namun terdapat 12% rumah tangga yang membuang sampahnya tidak pada lokasi khusus pembuangan sampah. Secara umum, pembakaran adalah praktik yang lazim di Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong sementara di Kota Palu, praktik umumnya adalah pada tong-tong sampah ataupun pada tempat-tempat khusus pembuangan sampah. Sebagian besar sampah dikumpulkan pada hari atau minggu yang sama. Namun, sepertiga dari total rumah tangga melaporkan sampah-sampah mereka tidak pernah diangkut keluar dari daerah tersebut, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jasa layanan persampahan dapat dilakukan.

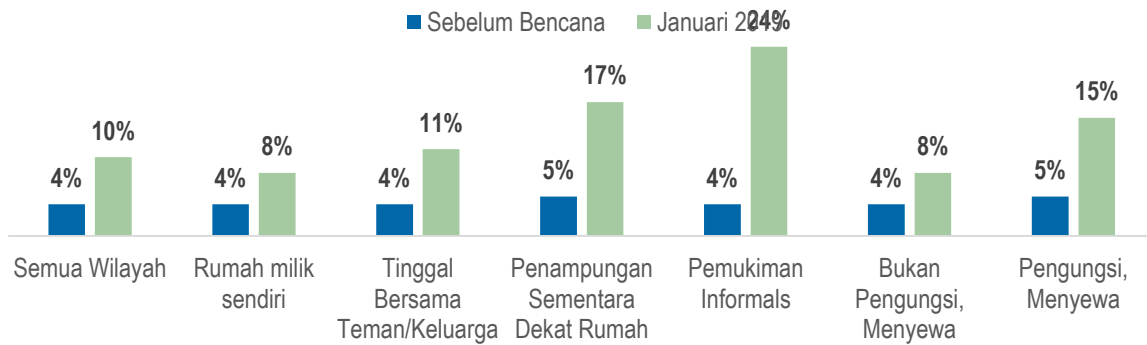
## Ekonomi

Secara umum, sebahagian besar mata pencaharian di Sulawesi Tengah telah berangsur pulih dalam enam bulan terakhir, meskipun proses pemulihan ekonomi lebih lanjut masih dapat terlihat pada tingkat pendapatan yang masih rendah dan tingkat pengangguran yang masih tinggi, terutama bagi para pengungsi.

Laporan dari rumah tangga memperlihatkan bahwa pekerjaan utama rumah tangga sebelum bencana adalah pertanian (32%), usaha kecil (18%), pegawai pemerintah dan layanan jasa (masing-masing 8%). Pertanian adalah yang paling umum di Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, dan Sigi, tetapi tidak di Palu, di mana usaha kecil, layanan jasa dan pegawai pemerintah lebih umum.

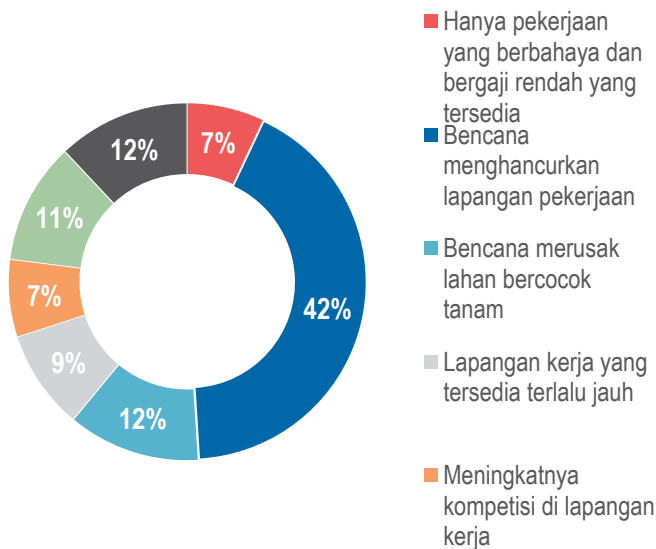
Pada awal Februari 2019, jenis pekerjaan utama yang dilaporkan oleh rumah tangga hampir sama, yang menunjukkan bahwa sebagian besar mata pencaharian di daerah terdampak bencana, telah berangsur pulih. Namun, sejak kejadian bencana, jumlah rumah tangga yang melaporkan bahwa mereka tidak memiliki pekerjaan utama dan menganggur meningkat lebih dari dua kali lipat dari 4% menjadi 10%. Ini terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala; Parigi Moutong hampir tidak ada rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan utama sebelum bencana (1%) dan ditemukan memiliki proporsi yang sama pada Februari 2019. Tidak ada sektor yang terpengaruh secara tidak proporsional oleh bencana, dan semua jenis pekerjaan dilaporkan memiliki dampak yang sama. Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan lebih cenderung tidak memiliki pekerjaan utama dan menganggur dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki, kemungkinan mencerminkan peran gender secara tradisional dan kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan.

Gambar 13: Rumah tangga yang melaporkan bahwa seluruh anggota keluarganya tidak bekerja berdasarkan status pengungsianya.



Efek pengangguran juga terlihat pada daya beli; rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah kehilangan pendapatan rata-rata 10% sejak bencana. Kelompok-kelompok pengungsi juga terpengaruh secara tidak proporsional, dan melaporkan kehilangan pendapatan rata-rata 20%. Survey pasar yang dilakukan oleh World Food Programme (WFP) pada bulan Desember 2018 menemukan bahwa meskipun sebagian besar bisnis telah dibuka kembali dan harga dan stok barang telah kembali ke tingkat sebelum krisis, 61% pedagang melaporkan mengalami penurunan secara keseluruhan dalam penjualan dan output keseluruhan.<sup>26</sup>

Gambar 14: Rumah tangga yang memiliki anggota yang mampu dan mau untuk bekerja menurut alasan belum bekerja.



Seperlima dari total rumah tangga juga melaporkan memiliki setidaknya satu orang anggota yang dapat bekerja, tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan. Ini jauh lebih tinggi untuk kelompok pengungsi, termasuk mereka yang tinggal di permukiman informal (32%) dan rumah lainnya (27%). Ini menunjukkan bahwa mengungsi telah mencabut pengungsi dari mata pencaharian tradisional mereka dan mereka kesulitan mempertahankan diri pada lahan dan rumah mereka. Alasan utama yang dilaporkan bahwa bisnis mereka telah hancur (42%) tanah rusak (12%), atau mereka tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan yang tersedia (11%). Bisnis yang hancur adalah masalah yang lebih besar di Palu dan Donggala (dilaporkan oleh 57% dan 46% rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota yang bersedia dan mampu bekerja,

masing-masing) dibandingkan Sigi atau Parigi Moutong, di mana lahan yang hancur adalah penyumbang pengangguran yang lebih besar (41% dan 23%). Ini konsisten dengan jenis pekerjaan utama yang tersedia di setiap Kabupaten.

## Ketahanan Pangan

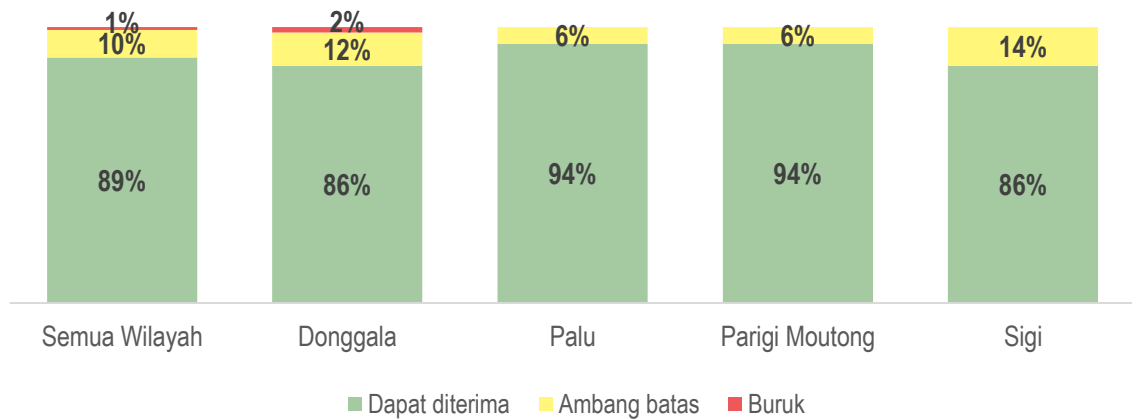
Ketahanan pangan di seluruh wilayah terdampak telah meningkat pesat, meskipun ada tanda-tanda mengkhawatirkan terkait masalah gizi yang serius perlu ditangani. Karena WFP telah melakukan analisis pasar yang terperinci, tim penilai fokus pada sisi permintaan pada sektor ketahanan pangan, dan menganalisa akses apa yang dimiliki rumah tangga terhadap makanan dan bagaimana mereka menangani kekurangan pangan dan masalah lainnya yang terkait.<sup>27</sup> REACH menghitung Skor Konsumsi Makanan (FCS) dan Pengurangan Koping

<sup>26</sup> WFP, Market Assessment in Central Sulawesi, Indonesia, December 2018.

<sup>27</sup> WFP, Laporan Penilaian/Survey Pasar Market di Sulawesi Tengah, Indonesia, Desember 2018.

Strategi Indeks (rCSI) untuk mengidentifikasi tren utama dalam ketahanan pangan di seluruh Sulawesi Tengah. Secara umum, FCS sebagian besar ditemukan berada pada kelas “dapat diterima” (89% rumah tangga). 10% berada pada kelas “ambang batas”, dan hanya 1% yang masuk pada kelas “buruk”. Skor cenderung lebih buruk di Donggala dan Sigi, khususnya di kecamatan terpencil di Donggala utara dan Sigi bagian selatan.

Gambar 15: Skor Konsumsi Makanan menurut Kabupaten/Kota



rCSI melihat bagaimana strategi rumah tangga untuk dapat membuat makanannya bertahan lebih lama pada kondisi kekurangan makanan, memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah berada pada kondisi yang cukup baik; Secara keseluruhan, 3,3 adalah skor rata-rata yang menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga tidak perlu mengadopsi strategi koping ekstrem untuk membuat makanan bertahan lebih lama.<sup>28</sup> Seperti FCS, skor rCSI ditemukan lebih tinggi dan lebih mengkhawatirkan pada daerah terpencil: rumah tangga di Donggala dan Palu ditemukan memiliki skor rCSI yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang berada di Parigi Moutong dan Sigi dengan skor yang lebih rendah. Skor ini kemudian berbeda ketika melihat status pengungsian. Mereka yang berada di permukiman informal memiliki rata-rata skor untuk rCSI 6,6, dan mereka yang tinggal di tenda di luar rumah memiliki skor 4,5, sementara kelompok populasi lainnya memiliki skor di bawah 3.

Tabel 4: Penurunan Indeks Koping Strategi menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	rCSI
Total	3.3
Donggala	5.2
Palu	3.8
Parigi Moutong	0.7
Sigi	1.8

Namun, kedua metode ini, FCS dan rCSI lebih cenderung untuk mengukur kuantitas makanan, ketimbang kualitasnya, oleh karena itu kondisi sebenarnya tidak tergambarkan. Laporan tingkat rumah tangga dari seluruh kelompok populasi dan Kabupaten menunjukkan bahwa makanan merupakan kebutuhan prioritas mereka dan merupakan item bantuan yang paling sering mereka terima pada satu bulan terakhir. Kebanyakan bantuan makanan tersebut adalah Indomie (Mie Instan), atau beras.<sup>29</sup> Ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga kekurangan keragaman makanan, sementara mereka menerima jumlah kalori yang cukup, bahkan kemungkinan dengan sangat kandungan nutrisi yang sangat rendah. Hal ini dapat menciptakan masalah kesehatan yang parah bagi sebagian besar populasi di kemudian hari jika persoalan ini tidak segera diatasi, terutama untuk anak-anak, laporan UNICEF pada bulan Desember 2018 memperlihatkan praktik menyusui dan menyusui yang kurang memadai.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> rCSI adalah ukuran ketahanan pangan yang melihat pada 5 set koping strategi yang mungkin digunakan oleh rumah tangga untuk bertahan lebih lama dalam menghadapi kondisi kekurangan makanan. rCSI dihitung dengan cara menanyakan ke responden berapa hari dalam seminggu, rumah tangga mereka mengaplikasikan tehnik koping strategi yang berbeda-beda untuk bisa bertahan lebih lama. Nilainya kemudian dikalikan dengan koefisien masing-masing kelompok makanan dan dijumlahkan. Sejauh ini, belum ada standard formal terkait range nilai rCSI, namun nilai antara 0 s/d 3 dianggap baik, 4 s/d 9 dianggap mencemaskan, dan >10 itu memprihatinkan (WFP VAM Unit, Afganistan, Guidance note: calculation of household food security outcome indicators, Desember 2012).

<sup>29</sup> [World Instant Noodles Association, Emergency Food Aid, 2019.](#)

<sup>30</sup> UNICEF, Indonesia Humanitarian Situation Report No. 5, 9 December 2019.



Sebagian besar rumah tangga memperoleh bahan makanannya dari pasar, namun beberapa rumah tangga di kecamatan-kecamatan yang sangat terpencil di Kabupaten Sigi Selatan, mereka menanam sendiri bahan makanannya. Selain itu, WFP menemukan bahwa sebagian besar rumah tangga berada sangat dekat dengan pasar tempat mereka berbelanja.<sup>31</sup> Hal ini meningkatkan pentingnya pemulihan mata pencaharian agar rumah tangga dapat memiliki lebih banyak uang untuk membeli makanan tambahan.

## Kesehatan

Kondisi akses kesehatan ditemukan serupa pada seluruh rumah tangga di seluruh lokasi pengungsian dan Kabupaten; 78% melaporkan tidak memiliki masalah untuk mengakses perawatan kesehatan, meskipun terdapat laporan dari minoritas yang cukup besar (9%) yang menunjukkan biaya perawatan kesehatan sangat tinggi bagi mereka, terutama di Donggala dan Parigi Moutong.

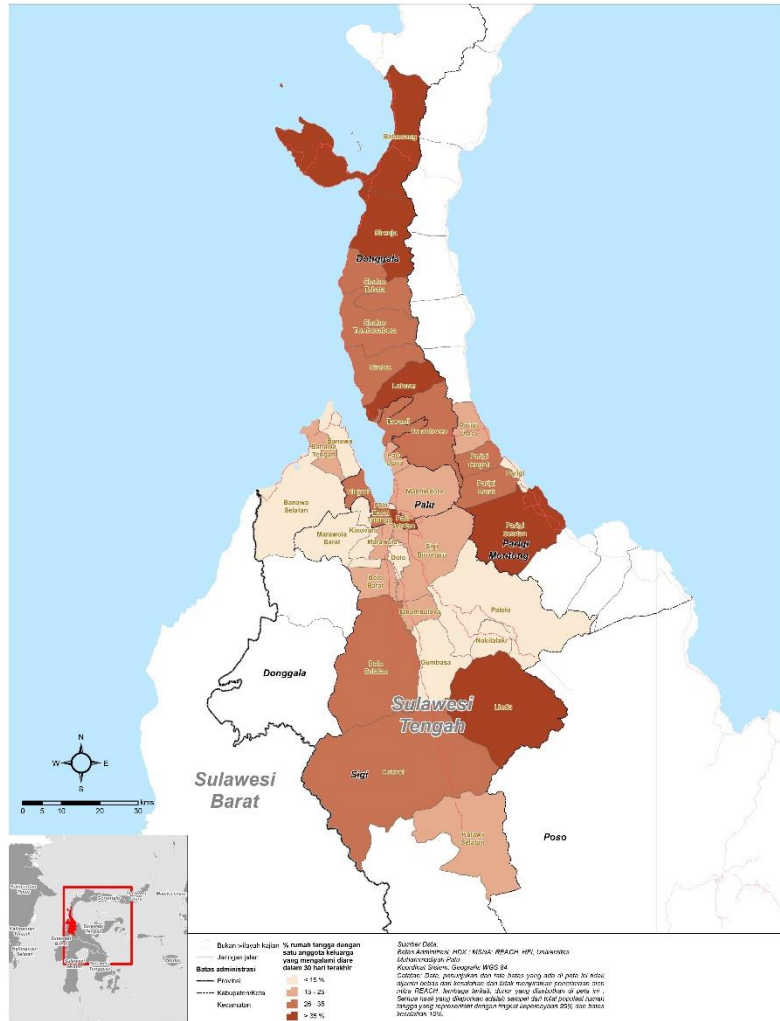
Rata-rata 40% rumah tangga melaporkan bahwa setidaknya terdapat seorang anggota keluarga mereka pernah mengalami masalah kesehatan yang memerlukan perawatan medis dalam 30 hari terakhir.

Permasalahan kesehatan dilaporkan lebih lazim terjadi pada rumah tangga pengungsi (51% di permukiman informal, 50% di tenda, dan 51% tinggal di rumah orang lain), dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak mengungsi (37% di rumah sendiri, 26% penyewa yang mengungsi, 31% penyewa). Hal ini menunjukkan bahwa keterpaparan dan tekanan yang terkait dengan kondisi pengungsian memiliki implikasi bagi kesehatan masyarakat.

Selain itu, rumah tangga yang tinggal di Sigi dan Donggala, yang merupakan daerah pedesaan dengan kondisi infrastruktur kesehatan yang tidak memadai, melaporkan lebih banyak masalah kesehatan daripada yang ada di Palu atau Parigi Moutong.

Masalah kesehatan utama di dominasi oleh demam dan batuk untuk 30 hari terakhir, meskipun begitu, 26% rumah tangga juga melaporkan diare sebagai masalah utama. Ini adalah masalah terbesar bagi rumah tangga yang tinggal di tenda di luar rumah mereka (45%), hal ini tidak mengejutkan mengingat buruknya kondisi sanitasi yang dilaporkan oleh rumah tangga tersebut. Sepertiga (33%) rumah tangga di permukiman informal juga melaporkan diare sebagai masalah utama dalam 30 hari sebelumnya. Selain itu, laporan mengenai adanya anggota rumah tangga yang mencari pengobatan akibat diare lebih umum ditemukan pada daerah yang lebih terpencil dengan infrastruktur WASH yang tidak memadai, seperti Donggala dan Sigi. Proporsi laporan rumah

Peta 3: Rumah tangga yang melaporkan bahwa terdapat setidaknya satu orang anggota keluarga yang membutuhkan perawatan medis karena diare dalam 30 hari terakhir menurut Kecamatan



<sup>31</sup> WFP, Market Assessment in Central Sulawesi, Indonesia, December 2018.

tangga yang mencari pengobatan medis akibat diare lebih tinggi pada bulan lalu ditemukan di Donggala dan Kota Palu (masing-masing 29% dan 28%), Parigi (24%) serta Sigi (19%). Sementara laporan yang sangat tinggi ditemukan di Donggala utara (Balaesang, Balaesang Tanjung, dan Kecamatan Sirenja).

Tabel 3: Laporan utama terkait masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir

Laporan masalah kesehatan dalam waktu 30 hari terakhir	Persentase	
Demam	53%	Dalam 30 hari terakhir, 41% rumah tangga melaporkan bahwa mereka tidak memiliki masalah kesehatan yang perlu ditangani dalam 30 hari terakhir. Namun, 29% rumah tangga melaporkan bahwa mereka membutuhkan pengobatan, dan 35% rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah mengakses layanan kesehatan untuk menangani masalah kesehatannya. Hal ini sangat lazim di Parigi Moutong, dimana keluhan tentang perawatan kesehatan
Batuk	50%	
Diare	26%	
Hipertensi	10%	
Penurunan Berat Badan	6%	
Masalah Pernafasan	5%	
Cidera	5%	
Lainnya	14%	

yang tidak memadai juga umum di antara rumah tangga (lihat, bagian “Berkomunikasi Dengan Masyarakat, di bawah). Lebih dari 1/4 rumah tangga di Parigi Moutong 26% juga mengakses layanan kesehatan untuk pemeriksaan rutin.

Selanjutnya, 18% rumah tangga melaporkan bahwa setidaknya ada satu anak dalam rumah tangga mereka yang belum divaksinasi.<sup>32</sup> Di atas permasalahan pengungsian yang penuh tekanan, kondisi tersebut akan meningkatkan potensi anak-anak untuk terkena penyakit menular, dan menempatkan mereka pada risiko yang lebih tinggi akan penyakit lebih lanjut yang berpotensi pada kematian. Ini sedikit lebih tinggi pada rumah tangga pengungsi di permukiman informal (22%) dan mereka yang tinggal di rumah lainnya (22%) tetapi tidak bagi mereka yang tinggal di rumah sendiri (16%) atau tinggal di sebelah bekas rumah mereka (19%). Jika kampanye imunisasi MMR belum dilakukan setelah bencana, keluarga pengungsi harus ditargetkan terlebih terlebih dahulu untuk mengurangi kesenjangan ini.

<sup>32</sup> While high, this is not that far from the 12.8% found by UNICEF (Indonesia, Humanitarian Situation Report No. 5, 9 December 2019.)

## Pendidikan

Untuk melengkapi penilaian terperinci tentang kehadiran dan kualitas sekolah yang dilakukan oleh Save the Children atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tim penilai memfokuskan diri pada pertanyaan yang lebih luas mengenai alasan ketidakhadiran untuk melengkapi temuan-temuan survei kualitatif.<sup>33</sup> Rata-rata 4% rumah tangga melaporkan bahwa setidaknya satu anak dalam rumah tangga tersebut tidak menghadiri pendidikan formal pada saat pengumpulan data berlangsung (rata-rata 1 anak). Hal ini menunjukkan peningkatan besar sejak Desember 2018 ketika UNICEF melaporan temuan bahwa hanya 70% anak-anak yang melanjutkan sekolah.<sup>34</sup> Proporsi ini relatif stabil di seluruh wilayah geografis dan status pengungsian.

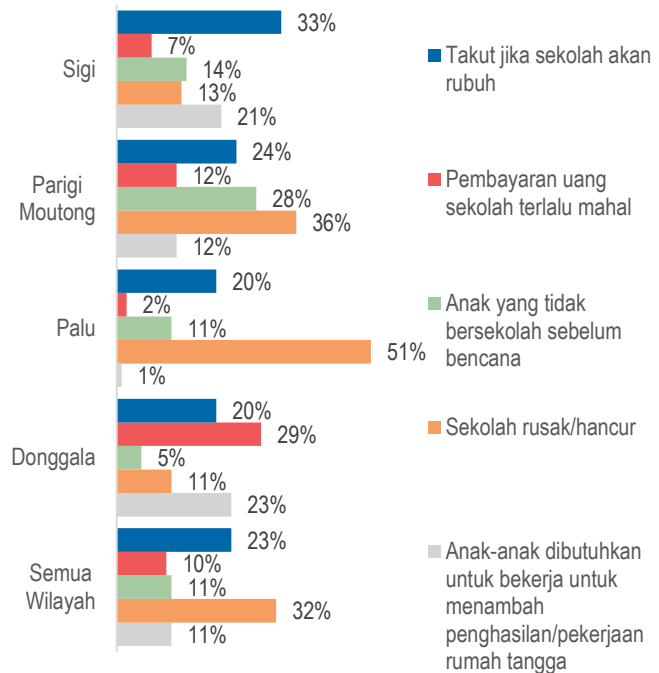
Temuan ini juga konsisten dengan proporsi sebelum bencana yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, menunjukkan bahwa tingkat kehadiran siswa sebagian besar telah pulih sejak bencana, dan sebagian besar rumah tangga yang memiliki anak dan tidak bersekolah adalah mereka yang tidak memiliki anak yang bersekolah sebelum bencana.<sup>35</sup> Namun, dukungan diperlukan bagi rumah tangga yang tinggal di permukiman informal, dimana kemungkinannya dua kali lebih besar untuk melaporkan setidaknya 1 anak dalam rumah tangganya tidak bersekolah.

Sebagian besar rumah tangga dengan anak-anak yang tidak bersekolah melaporkan bahwa alasan mengapa anak-anak mereka tidak bersekolah adalah karena sekolah telah rusak atau hancur (32%) atau tidak lagi aman (23%). Sekolah yang hancur ditemukan menjadi masalah yang lebih besar di Kota Palu (dilaporkan oleh 51% rumah tangga) dan Parigi Moutong (36%) dibandingkan di Donggala atau Sigi (13% dan 11%). Ini kemungkinan karena Kota Palu lebih parah terkena dampak bencana alam dan Parigi Moutong secara rata-rata memiliki proporsi rumah tangga dengan anak-anak tidak bersekolah (2% rumah tangga) yang lebih rendah. Rumah tangga di Parigi Moutong juga secara signifikan (28%) lebih mungkin melaporkan bahwa anak-anak mereka tidak bersekolah sebelum bencana dibandingkan rumah tangga di wilayah lainnya.

Sebagian besar sekolah dilaporkan terdampak oleh bencana, termasuk banyak yang masih berfungsi: 25% rumah tangga melaporkan bahwa sekolah terdekat mengalami rusak ringan, 29% rusak sedang, dan 14% rusak parah atau hancur total. Hanya 20% rumah tangga melaporkan bahwa sekolah terdekat dalam kondisi baik. Pengecualian untuk ini adalah Parigi Moutong, di mana sebagian besar sekolah dilaporkan dalam kondisi baik. Sebagian besar (40%) rumah tangga di permukiman informal melaporkan bahwa sekolah terdekat hancur; ini kemungkinan karena sekolah itu hancur bersama dengan bangunan di sekitarnya.

Di Kota Palu, masalah terbesar terkait dengan kehadiran di sekolah adalah rusaknya bangunan sekolah (51% rumah tangga): rekonstruksi sekolah harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa siswa merasa aman untuk kembali bersekolah. Di Sigi, sebagian besar rumah tangga merasa tidak aman karena bangunan sekolahnya

Gambar 16: Rumah tangga dengan setidaknya satu orang anak yang tidak masuk sekolah, dengan alasan utama mengapa anak tersebut tidak masuk sekolah menurut Kabupaten/Kota



<sup>33</sup> Save the Children Indonesia, Joint Education Needs Assessment, December 2018 (forthcoming)

<sup>34</sup> UNICEF, Indonesia Humanitarian Situation Report No. 5, 9 December 2019.

<sup>35</sup> Indonesia Bureau of Statistics, Kota Palu Dalam Angka, 2018; Indonesia Bureau of Statistics, Kabupaten Donggala Dalam Angka, 2018; Indonesia Bureau of Statistics, Kabupaten Sigi Dalam Angka, 2018; Indonesia Bureau of Statistics, Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka, 2018.

mungkin runtuh (33% rumah tangga). Di Donggala, masalah terbesar adalah biaya sekolah yang terlalu mahal (29%). Rumah tangga di Parigi Moutong tampaknya mengalami masalah dengan sekolah yang rusak (36%) dan anak-anak tidak bersekolah karena alasan lain sebelum bencana (28% rumah tangga melaporkan bahwa anak-anak mereka tidak bersekolah sebelum bencana). Masalah-masalah yang terkait dengan ketidakhadiran sebelum gempa bumi dapat menjadi persoalan begitu juga perbaikan sekolah dan persoalan lainnya terkait bencana yang harus ditangani di wilayah lain di Provinsi Sulawesi Tengah.

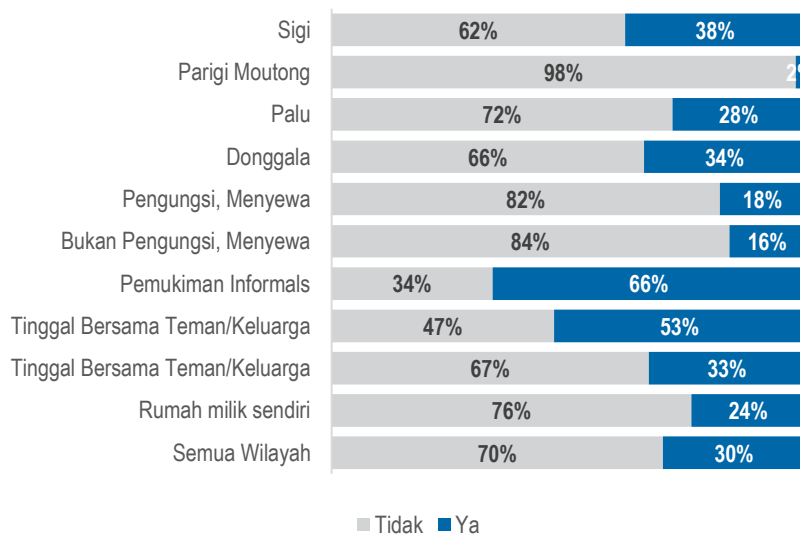
## Berkomunikasi dengan Komunitas

Hampir sepertiga rumah tangga melaporkan telah menerima bantuan pada bulan sebelumnya. Rumah tangga yang mengungsi, khususnya mereka yang tinggal di permukiman/pengungsian informal dan di tenda-tenda di sebelah rumah mereka, jauh lebih mungkin telah menerima bantuan.

Walaupun secara umum, hal ini telah mencerminkan kebutuhan rata-rata penduduk (mereka yang jelas-jelas tinggal di lokasi pengungsian sangat mungkin jauh lebih membutuhkan jika dibandingkan dengan penduduk yang tidak mengungsi atau yang memiliki sumberdaya untuk menyewa rumah). Hal ini juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang mengungsi dan tidak mudah untuk diidentifikasi adalah rumah tangga yang kemungkinan akan terlewatkan (tidak menerima bantuan). Hanya sepertiga dari rumah tangga pengungsi yang tinggal di rumah lain, seperti rumah milik teman atau sanak famili, melaporkan telah menerima bantuan.

Selain itu, daerah yang jelas-jelas terkena dampak lebih mungkin untuk menerima bantuan, Donggala memiliki proporsi tertinggi untuk rumah tangga yang menerima bantuan dan hampir tidak ada rumah tangga yang melaporkan telah menerima bantuan di Parigi Moutong. Upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk menjangkau rumah tangga terdampak di luar lokasi-lokasi pengungsian

**Gambar 17: Rumah tangga yang melaporkan telah menerima bantuan dalam satu bulan terakhir menurut Kabupaten/Kota dan status pengungsian**



Sebagian besar bantuan dilaporkan berasal dari pemerintah (diindikasikan sebagai sumber utama bantuan oleh 48% rumah tangga yang menerima bantuan bulan sebelumnya), terlepas dari lokasinya apakah Kabupaten / Kota. LSM hanya ditemukan sebagai sumber bantuan yang signifikan di Sigi dan Donggala; dan hanya di Parigi Moutong dimana Palang Merah Indonesia (PMI) dilaporkan sebagai sumber utama bantuan.

Sebagian besar rumah tangga yang menerima bantuan pada bulan lalu melaporkan bahwa mereka telah menerima bantuan makanan (91%) diikuti oleh air (17%) dan bahan-bahan tempat tinggal (17%). Rumah tangga yang mengungsi lebih cenderung menerima bantuan daripada yang mengungsi (89% dan 76% rumah tangga).

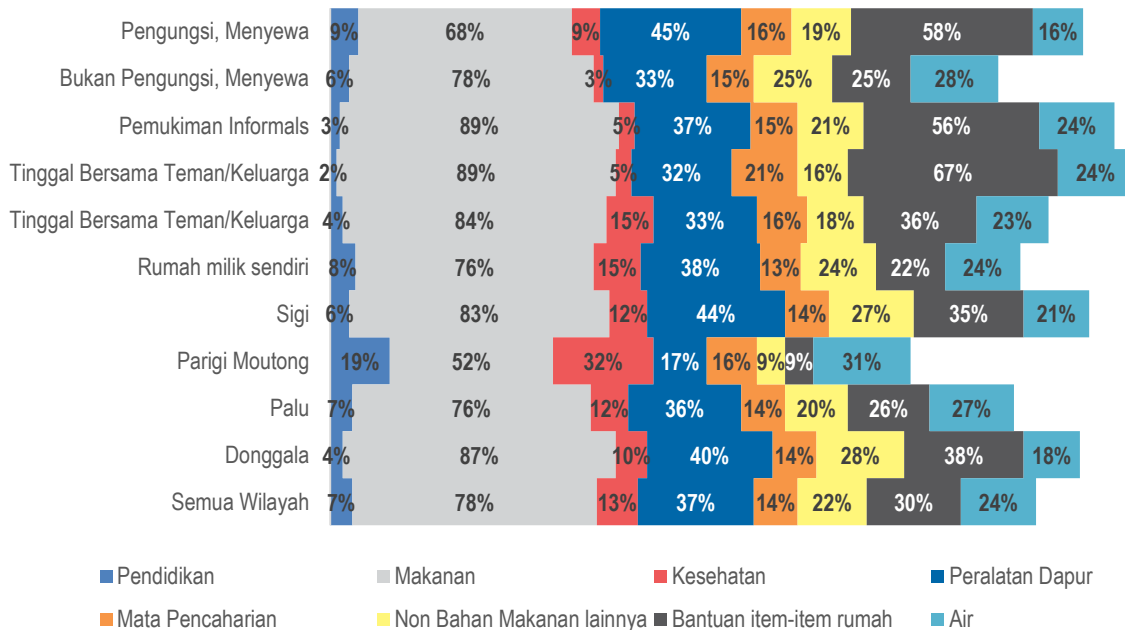
Lebih dari dua pertiga (69%) rumah tangga yang menerima bantuan pada bulan sebelumnya melaporkan puas dengan bantuan yang telah mereka terima. Mereka yang tidak puas (29%) melaporkan bahwa alasan utama mereka tidak puas adalah karena bantuan itu tidak cukup (86%). Sangat sedikit keluhan lain yang tercatat.

Bantuan yang paling dibutuhkan oleh rumah tangga di keempat kabupaten adalah makanan (meskipun jauh lebih sedikit rumah tangga di Parigi Moutong menganggapnya sebagai kebutuhan teratas daripada rumah tangga lain, hal yang wajar, mengingat bahwa Parigi Moutong kurang terdampak daripada daerah lain). Sebagaimana dicatat

dalam bagian ketahanan pangan (di atas), kebutuhan utama rumah tangga juga makanan, menunjukkan bahwa keragaman makanan yang lebih besar perlu dikirim untuk menghindari komplikasi akibat kekurangan gizi

Peralatan dapur juga merupakan kebutuhan prioritas di semua pengungsian, kemungkinan karena adanya penambahan kebutuhan umum selain bahan makanan (NFI).<sup>36</sup> Di Parigi Moutong, layanan kesehatan dilaporkan sebagai kebutuhan 3 teratas oleh 32% rumah tangga, yang menunjukkan diperlukannya peningkatan layanan kesehatan secara menyeluruh. Membuka peluang mata pencaharian juga ajukan, khususnya di antara pengungsi, yang menunjukkan diperlukan dukungan tambahan dalam meningkatkan mata pencaharian penduduk dan pengungsi secara umum.

Gambar 18: Kebutuhan Prioritas menurut Kabupaten/Kota



## KESIMPULAN

Empat bulan paska kejadian gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, penduduk masih membutuhkan banyak bantuan kemanusiaan. Untuk memahami ruang lingkup, kebutuhan, dan kerentanan penduduk terdampak, di bawah wewenang Klaster PP yang dipimpin Kemensos dan pemerintah Sulawesi Tengah, HFI dan UNISMUH, dengan dukungan dari REACH dilakukan penilaian di tingkat rumah tangga pada 38 kecamatan di empat kabupaten yang terdampak di Provinsi Sulawesi Tengah. Di bawah ini adalah ringkasan dari temuan dan rekomendasi utama berdasarkan data.

Hasilnya menunjukkan bahwa kebutuhan sangat bervariasi berdasarkan status dan lokasi pengungsi. 26% penduduk mengungsi di luar rumah atau rumah sewa mereka sendiri; namun, hanya 9% dari total penduduk yang ditargetkan tinggal di permukiman informal berdasarkan penilaian dan intervensi sebelumnya. Sebagian besar pengungsi menumpang (10%) di rumah bukan pengungsi, atau tinggal di rumah kosong yang bukan milik mereka. 5% lainnya tinggal di tenda di luar rumah mereka.

Kebutuhan cenderung bervariasi berdasarkan status pengungsi, bukan karena faktor geografi. Sebagian besar rumah tangga di Palu, Sigi, dan Donggala memiliki kebutuhan yang sama, dalam hal ketahanan pangan, air, sanitasi dan kebersihan (WASH). Di Parigi Moutong, yang jauh lebih sedikit terkena dampak bencana, kebutuhan seringkali berbeda dan umumnya terkait dengan kesehatan dan pendidikan.

<sup>36</sup> The assessment found similar needs to those highlighted by AHA centre in October 2018, suggesting that many of the requested items have either worn out or were not enough to meet the needs of the population (AHA Centre, Situation Update NO. 12, M 7.4 Earthquake & Tsunami, Sulawesi, Indonesia, 15 October 2018).



Pengungsi, terutama mereka yang tinggal di permukiman informal dan mereka yang tinggal di tenda atau di tenda darurat di sebelah bekas rumah mereka, adalah kelompok yang paling rentan dan paling terpengaruh oleh dampak bencana. Mereka mengalami lebih banyak kerugian ekonomi, baik dalam hal pendapatan maupun pekerjaan, dan akan membutuhkan lebih banyak dukungan untuk membangun kembali bisnis dan mata pencaharian mereka dalam lokasi pengungsian. Mereka juga dua kali lebih memungkinkan memiliki anak yang tidak bersekolah, dan karenanya membutuhkan dukungan pendidikan tambahan. Pengungsi secara signifikan lebih cenderung juga melaporkan masalah kesehatan

Meskipun sejumlah besar pengungsi tinggal di rumah milik rumah tangga lain atau didukung langsung oleh komunitas lokal, mereka juga mengalami kesulitan dalam mengakses beberapa layanan, khususnya dukungan tempat tinggal, dan seringkali lebih sulit menerima bantuan karena lebih sulit diidentifikasi dalam populasi lokal. Penyewa, meskipun kemungkinan besar terabaikan oleh bantuan, umumnya melaporkan mendapatkan layanan terbaik, mengidentifikasi bahwa kemampuan membayar sewa juga menyiratkan kemampuan untuk mendapatkan layanan yang memadai.

Kebutuhan terbesar rumah tangga adalah lokasi pengungsian adalah makanan, meskipun indikator ketahanan pangan positif dan jenis bantuan yang paling umum diterima adalah makanan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya keragaman pola makan, dimana tepung dan pendapatan adalah makanan utama yang didistribusikan ke rumah tangga. Makanan yang lebih beragam sangat penting untuk menghindari komplikasi gizi yang mungkin terjadi dari pola makan khusus ini.

Masalah kesehatan, terutama batuk dan demam, yang umum terjadi, terutama oleh rumah tangga yang mengungsi di permukiman informal dan di tempat penampungan di sebelah rumah mereka. Masalah-masalah ini kemungkinan diperparah oleh masalah lainnya yang belum terselesaikan seputar gizi dan sanitasi; termasuk gizi buruk dan lingkungan sanitasi dan tingginya tingkat diare di antara rumah tangga IDP.

Meskipun isu-isu WASH yang dicatat selama respons awal sebagian besar telah diselesaikan, Rumah Tangga yang mengungsi di tenda atau tempat penampungan sementara di sebelah rumah mereka dilaporkan memiliki perilaku buang air besar sembarangan yang mengkhawatirkan, dan meskipun ada jamban komunal yang cukup di permukiman informal, kondisi jamban komunal terlalu padat di banyak lokasi dan kekurangan banyak standar perlindungan dasar, khususnya jamban yang telah dipisah untuk laki-laki dan perempuan.

Secara geografis, akses mendapatkan layanan dasar di Palu sangat tergantung pada status pengungsi; rumah tangga bukan pengungsi cenderung mendapatkan layanan dasar dengan lebih mudah dan memadai daripada pengungsi. Di Donggala dan Sigi, semakin jauh kecamatan, semakin sulit mendapatkan layanan dasar; rumah tangga di Donggala Utara (Balaesang, Sirenja, dan Balaesang Tanjung) dan Sigi Selatan (Kulawi, Kulawi Selatan, Lindu, Gumbasa, dan Dolo Selatan) lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengakses makanan, air, sanitasi, dan layanan kesehatan yang memadai daripada kecamatan yang lebih dekat ke kota Palu. Sebagian besar rumah tangga di Parigi Moutong tidak terpengaruh dan banyak keluhan rumah tangga lebih terfokus pada masalah pembangunan, seperti kurangnya layanan kesehatan atau kekurangan air.

Rumah tangga yang tinggal di daerah likuifaksi dan tsunami tidak dapat kembali dan membangun kembali di tanah mereka. Banyak yang telah diungsikan ke tempat penampungan sementara yang dibangun pemerintah; namun, masih banyak yang tidak dapat kembali ke rumah dan memerlukan dukungan tambahan untuk diungsikan ke daerah yang lebih aman. Selain itu, sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah yang tidak terpengaruh oleh likuifaksi adalah rawan likuifaksi, dan populasi yang tinggal di sana rentan terhadap bencana di masa depan.<sup>37</sup> Mayoritas rumah tangga, terlepas dari lokasi pengungsian, ingin memperbaiki atau membangun kembali rumah mereka sebelumnya dan melanjutkan kehidupan mereka sebelumnya.

## Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, berikut langkah yang direkomendasikan:

- Sebagian besar rumah tangga, terlepas dari status pengungsi, ingin tinggal di lokasi mereka saat ini selama enam bulan ke depan. Tanpa alternatif seperti tempat peralihan sementara pemerintah atau

<sup>37</sup> The Conversation, "2012 research had identified Indonesian city Palu as high risk of liquefaction," 2018.

rumah yang dibangun kembali, mereka akan tetap seperti sekarang; rumah tangga yang tinggal di tenda mungkin memerlukan tempat tinggal sementara pengganti karena tenda yang dipakai mungkin telah usang/rusak/lusuh dalam 6 bulan terakhir.

- Dukungan hunian sementara harus fokus pada pemberdayaan populasi lokal untuk membangun kembali atau memperbaiki tempat pengungsian mereka. Mencari lokasi baru untuk membangun tempat hunian sementara untuk penduduk yang tidak dapat kembali ke lokasi mereka (seperti zona likuifaksi atau daerah rentan tsunami) dan yang tidak memiliki tempat di pengungsian yang ada.
- Dukungan WASH tambahan harus diberikan kepada rumah tangga yang tinggal di tenda di luar rumah mereka dan permukiman informal untuk mengurangi buang air besar sembarangan dan meningkatkan praktik sanitasi dan kebersihan secara keseluruhan. Ini sangat penting karena banyak kasus diare dan penyakit lain yang dilaporkan di lokasi-lokasi ini.
- Layanan kesehatan harus ditingkatkan dan dibuat agar lebih mudah diakses, khususnya di Kabupaten Parigi Moutong. Berdampingan dengan bantuan sanitasi, upaya pencegahan tambahan harus dilakukan untuk membatasi penyebaran diare dan penyakit menular lainnya, terutama di permukiman informal dan rumah tangga yang mengungsi di sebelah rumah mereka, di mana anggota rumah tangga dilaporkan lebih rentan terhadap penyakit.
- Tingkat kehadiran anak-anak yang bersekolah dipengaruhi baik karena mengungsi dan kerusakan sekolah. Perpindahan tempat tinggal dan Perbaikan sekolah keduanya cenderung meningkatkan tingkat kehadiran. Namun, tingkat rumah tangga yang lebih tinggi di Parigi Moutong dengan anak-anak yang tidak bersekolah kemungkinan mengindikasikan bahwa ada masalah yang lebih dalam terkait dengan kehadiran anak sekolah yang perlu ditangani.
- Upaya yang lebih besar perlu dilakukan untuk mengidentifikasi rumah tangga yang mengungsi di tempat yang bukan milik mereka dan hidup/menumpang dengan rumah tangga lain, karena mereka kemungkinan besar akan dilewatkan oleh penyedia bantuan.
- Peningkatan layanan kesehatan untuk pengungsi dan rumah tangga di Parigi Moutong harus dipastikan; seperti menyediakan perawatan kesehatan yang lebih terjangkau dan menyediakan lebih banyak obat-obatan.
- Peningkatan psikososial untuk mengatasi potensi trauma dalam populasi; banyak rumah tangga memiliki anggota yang berjuang dengan masalah emosional yang terkait dengan bencana dan kemungkinan memiliki implikasi pada kesehatan, niat pergerakan, dan bidang lain yang menjadi perhatian.
- Upaya tambahan harus dilakukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas makanan yang didistribusikan; mie instan dan makanan tepung biasa yang telah didistribusikan sejauh ini tidak memiliki nilai gizi dan cenderung berkontribusi terhadap kekurangan gizi di masa depan jika tidak ditambah dengan makanan yang lebih bergizi.
- Pemulihan ekonomi, khususnya usaha untuk memulihkan bisnis dan jalur pinjaman, sangat penting bagi rumah tangga di Sulawesi Tengah untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama yang berkaitan dengan kesenjangan makanan, karena sebagian besar rumah tangga melaporkan mendapatkan sebagian besar makanan mereka dari transaksi di pasar. Pemulihan ekonomi kemungkinan terkait dengan peningkatan hasil gizi dan pangan bagi penduduk.
- Bantuan umumnya diarahkan ke kecamatan dan kelompok pengungsi yang paling membutuhkan. Namun, peningkatan dalam jumlah dan jenis bantuan mungkin perlu disesuaikan berdasarkan kebutuhan rumah tangga di berbagai daerah dan status pengungsian.

Selama enam bulan ke depan, rumah tangga akan terus melakukan pemulihan dan membangun kembali kehidupan mereka yang dihancurkan oleh gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada bulan September 2018. Namun, semoga rumah tangga, terutama bagi mereka yang terpaksa mengungsi, yang masih menghadapi tantangan, dan tanpa dukungan tambahan, dapat terus berjuang dalam pemulihan mereka. Namun, dengan menargetkan bantuan kepada penduduk yang paling membutuhkan, upaya tambahan dapat dilakukan untuk membantu penduduk untuk segera pulih dan membangun kembali setelah bencana. Dengan gempa bumi yang terus terjadi di Sulawesi Tengah, risiko untuk pengungsi tambahan dan kebutuhan baru bagi penduduk sangat mungkin terjadi.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Gempa bumi terus terjadi di Sulawesi Tengah hingga Maret 2019 (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Gempabumi Dirasakan, March 2019).

## ANNEXES

## Annex 1: Penduduk rumah tangga dan minimum ukuran oleh sampel kecamatan

Sub-districts	Number of households	Sample size	Sample size including 10% buffer	Total number of planned interviews	Total number of actual interviews
Balaesang	6,776	95	10	105	118
Balaesang Tanjung	2,023	92	9	101	112
Banawa	8,902	95	10	105	112
Banawa Selatan	6,947	95	10	105	101
Banawa Tengah	2,937	93	9	102	98
Dolo	8,059	95	10	105	98
Dolo Barat	4,226	94	9	103	110
Dolo Selatan	4,587	94	9	103	120
Gumbasa	3,803	94	9	103	111
Kinovaro	3,663	94	9	103	105
Kulawi	4,463	94	9	103	109
Labuan	3,793	94	9	103	99
Lindu	1,562	91	9	100	126
Mantikulore	19,100	96	10	106	130
Marawola	8,760	95	10	105	118
Marawola Barat	2,434	92	9	101	115
Nokilalaki	1,702	91	9	100	106
Palolo	9,187	95	10	105	120
Palu Barat	14,858	95	10	105	114
Palu Selatan	21,476	96	10	106	98
Palu Timur	14,451	95	10	105	111
Palu Utara	6,574	95	10	105	107
Parigi	8,801	95	10	105	126
Parigi Barat	2,520	93	9	102	111
Parigi Selatan	7,220	94	9	103	109
Parigi Tengah	2,873	93	9	102	110
Parigi Utara	1,989	92	9	101	116
Sigi Biromaru	15,397	95	10	105	127
Sindue	5,444	94	9	103	119
Sindue Tobata	2,761	93	9	102	122
Sindue Tombusabora	3,464	93	9	102	125
Sirenja	5,281	94	9	103	108
Tanambulava	2,641	93	9	102	109
Tanantovea	3,873	94	9	103	99
Tatanga	13,578	95	10	105	104
Tawaeli	6,334	95	10	105	118
Ulujadi	8,799	95	10	105	110
Kulawi Selatan	2,668	95	10	105	113
<b>Grand Total</b>	<b>253,926</b>	<b>3,573</b>	<b>359</b>	<b>3,932</b>	<b>4,264</b>